



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
Laman : <https://lampung.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.9.PR.04.04 - 51

04 Januari 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lingkungan Kantor Wilayah Lampung Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di -
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2023.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Kantor Wilayah Lampung



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023.



Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Kepala Kantor Wilayah,

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berisikan tentang Capaian Kinerja dan Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Lampung sepanjang Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan di Tahun 2023.

Tahun 2023, merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran telah tercapai dengan baik sesuai indikator yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dan Target Kinerja (Tarja) Tahun 2023 yang tercermin dari hasil realisasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.
2. Target Kinerja (Tarja) Tahun 2023 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 masih menghadapi beberapa tantangan namun dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 mencapai 98.79% atau sebesar Rp. 254.076.544.269,- (<http://spanint.kemenkeu.go.id>) Tanggal 04 Januari 2024 pukul 15.40 WIB) dari total anggaran sebesar Rp. 257.178.360.000,-. Namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan sangat baik dan efisien.

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKjIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.





A. Latar Belakang

a. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang merupakan Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Dalam kegiatan konsolidasi dan koordinasi internal dilaksanakan dengan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung baik dengan pejabat struktural dan pegawai di Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis maupun melalui monitoring, peninjauan dan pengarahan pada jajaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Kegiatan koordinasi dan kolaborasi eksternal dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh stakeholder di Propinsi Lampung. Khusus dengan aparat penegak hukum di Propinsi Lampung koordinasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (DILKUMJAKPOL) sebagai sarana proses penegakkan hukum dalam *Integrated Criminal Justice System* di wilayah Provinsi Lampung.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *good governance* dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk itulah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai tujuan sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri,



melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

b. **Visi dan Misi**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas adalah menjadikan *Peningkatan Produktivitas Sebagai Prioritas*. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Lampung, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi :

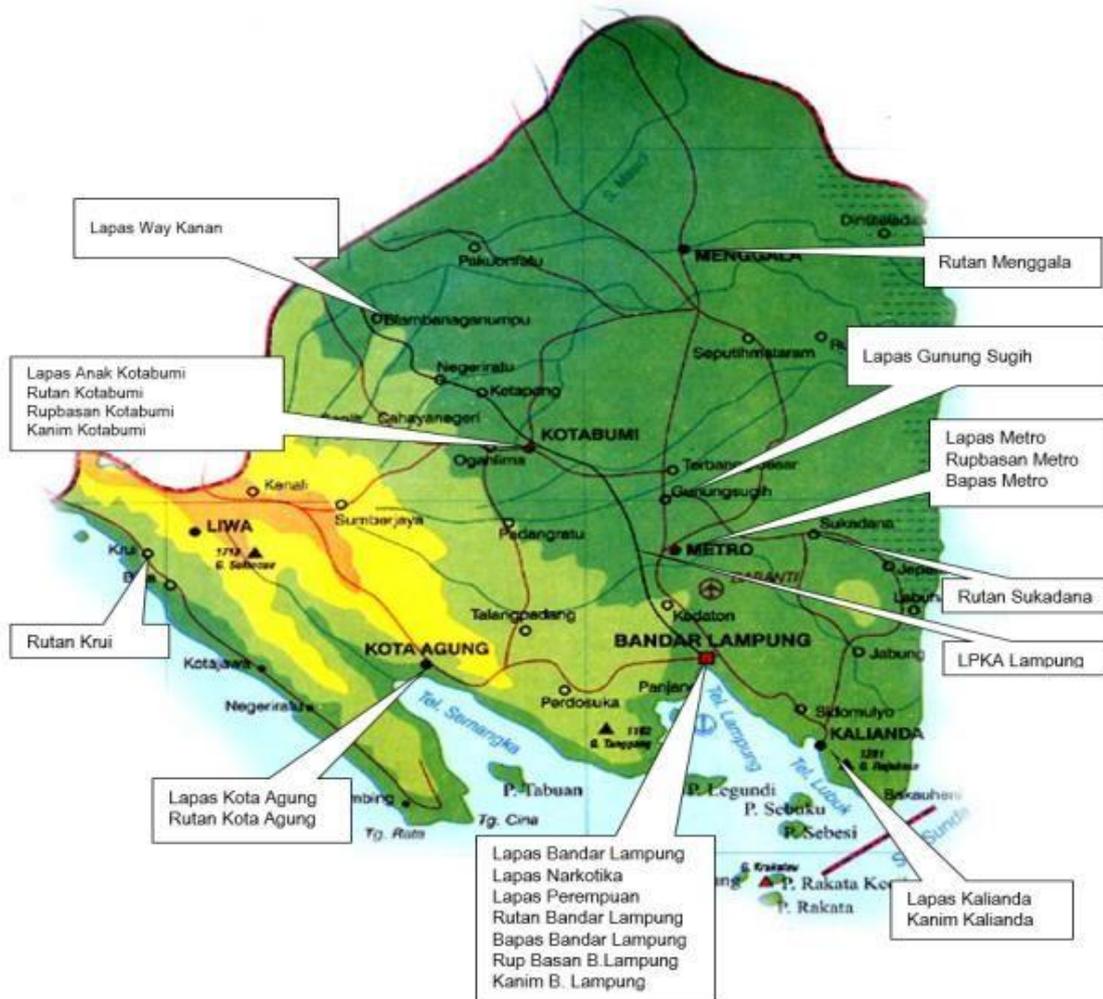
1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Organisasi

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dahulu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung, berdiri pada tahun 1982 berdasarkan KEPMENKEH RI Nomor M-868.KP.04.10 Tanggal 07 April 1982.

Pada saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bengkulu masih bergabung dengan Propinsi Lampung, namun pada Tahun 1985 Propinsi Bengkulu tidak bergabung lagi dengan Propinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni:

1. Departemen Kehakiman (1945 – 1999);
2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999 – 2001);
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001 – 2004);
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2009);
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 sampai dengan sekarang).



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki **26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis** terdiri 10 (sepuluh) Lembaga Pemasyarakatan, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (dua) Balai Pemasyarakatan, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi sebagai berikut:

i. Lembaga Pemasyarakatan:

1. LAPAS Klas I A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. LAPAS Klas II A Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
3. LAPAS Klas II A Metro (Kota Metro).
4. LAPAS Anak Klas II A Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
5. LAPAS Klas II B Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

6. LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
7. LAPAS Wanita Klas IIA Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
8. Lapas Kelas IIB Way Kanan (Kabupaten Way Kanan).
9. Lapas Kelas III Gunung Sugih (Kabupaten Lampung Tengah).
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB (Kabupaten Pesawaran).

ii. Rumah Tahanan Negara

1. RUTAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUTAN Sukadana (Kabupaten Lampung Timur).
3. RUTAN Menggala (Kabupaten Tulang Bawang).
4. RUTAN Krui (Kabupaten Pesisir Barat).
5. RUTAN Kotabumi (Lampung Utara).
6. RUTAN Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

iii. Balai Pemasyarakatan

1. BAPAS Klas II Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. BAPAS Klas II Metro (Kota Bandar Metro).
3. BAPAS Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
4. BAPAS Klas II Pringsewu (Kabupaten Pringsewu).

iv. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

1. RUPBASAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUPBASAN Klas II Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. RUPBASAN Klas II Metro (Kota Metro).

v. Kantor IMIGRASI

1. Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. Kantor Imigrasi Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. Kantor Imigrasi Klas III Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung terdiri atas:

a. Divisi Administrasi:

1) Tugas :

- i. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

2) Fungsi :

- i. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.
- ii. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- iii. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- iv. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- v. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.

- vi. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- vii. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Divisi Pemasyarakatan:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
 - ii. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
 - iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.
 - iv. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

c. Divisi Keimigrasian:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
 - ii. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
 - iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
 - iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
 - ii. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
 - iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Keempat Divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a) Bagian Umum
 - i) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - ii) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- b) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - i) Subbagian Program dan Pelaporan
 - ii) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

2) Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - i) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - ii) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - i) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - ii) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

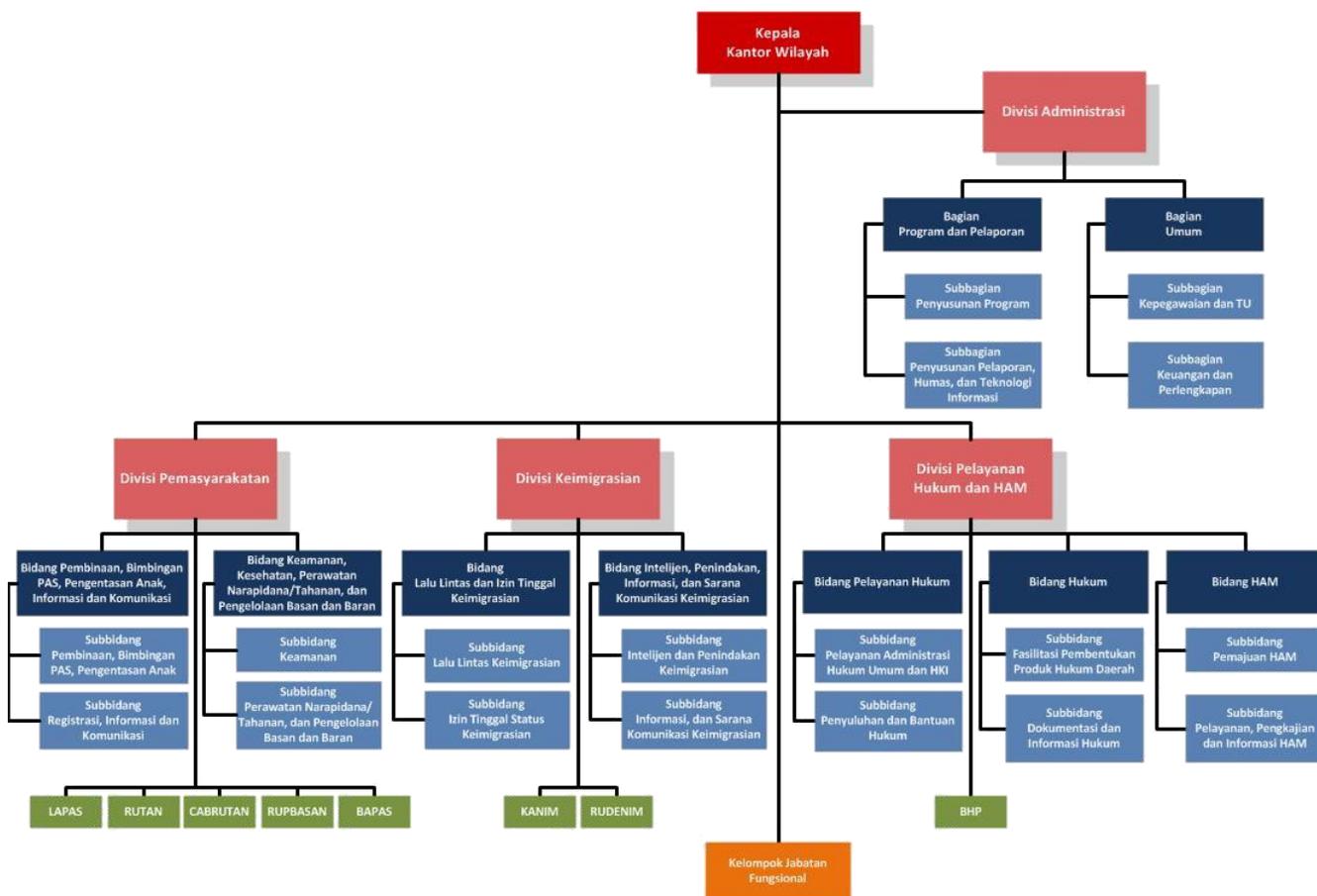
3) Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
 - i) Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - ii) Subbidang Informasi Keimigrasian
- b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - i) Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - ii) Subbidang Penindakan Keimigrasian

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pelayanan Hukum
 - i) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - ii) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- b) Bidang Hukum
 - i) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - ii) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- c) Bidang Hak Asasi Manusia
 - i) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - ii) Subbidang Pengkasian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Lampung

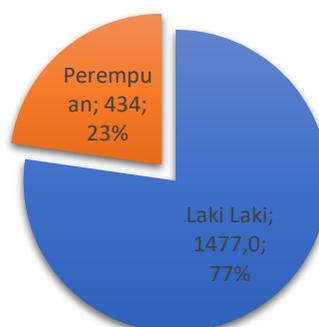
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang menjunjung tinggi profesionalisme dan berkompentensi tinggi. Dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, yang *belum terdapat Satuan Kerja Pemasarakatan maupun Imigrasi* adalah **Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat** (4 Kabupaten).

Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung *per-tanggal 02 bulan Januari tahun 2023* menunjukkan terdapat **1.911 Pegawai** yang tersebar di **27 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah**. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki **193 pegawai** yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

INFOGRAFIS PEGAWAI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH LAMPUNG

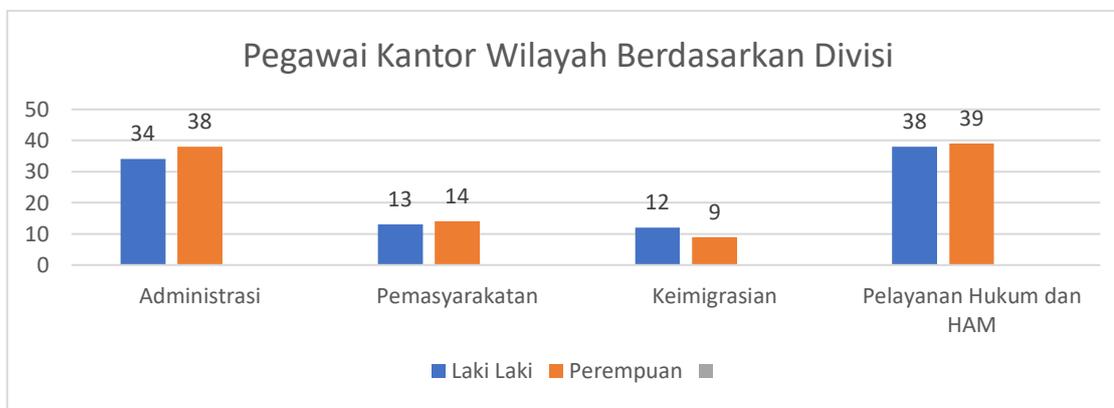
Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Gender

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.452	437	1.889



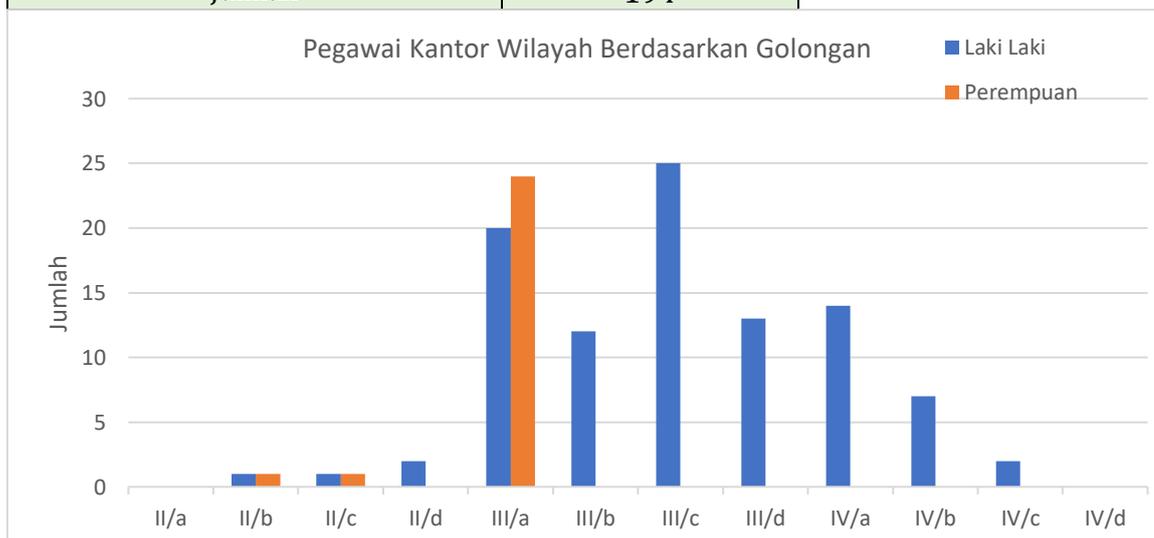
Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi

DIVISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Administrasi	31	37	68
Pemasyarakatan	13	14	27
Keimigrasian	12	9	21
Pelayanan Hukum dan HAM	38	39	77
Jumlah	94	100	194



Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
II/a	2
II/b	7
II/c	3
II/d	3
III/a	26
III/b	31
III/c	57
III/d	29
IV/a	20
IV/b	11
IV/c	5
IV/d	0
Jumlah	194



Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Struktural	32
JFT	84
JFU	78
Jumlah	194

Kantor Wilayah Lampung memiliki PPNPM yang bertugas pada Kantor Wilayah yaitu :

No	Tugas	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pramusaji	6	3
2	Driver	5	0
3	Security	8	0
4	Teknisi	1	0
Jumlah		20	3

Berikut data jumlah pegawai Jajaran Kantor Wilayah Lampung :

NO	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung	101	97	198
2.	Lapas Kelas I Bandar Lampung	133	33	166
3.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	128	18	146
4.	Lapas Kelas IIA Metro	87	19	106
5.	Lapas Kelas IIA Kalianda	79	5	84
6.	Lapas Kelas IIA Kotabumi	61	5	66
7.	Lapas Kelas IIB Kotaagung	50	10	60
8.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	107	18	125
9.	Rutan Kelas IIB Manggala	57	5	62
10.	Rutan Kelas IIB Krui	45	8	53
11.	Rutan Kelas IIB Sukadana	58	4	62
12.	Bapas Kelas II Bandar Lampung	35	33	68
13.	Bapas Kelas II Metro	36	19	55
14.	Rupbasan Kelas II Metro	16	5	23
15.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	21	9	30
16.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	13	2	15
17.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	37	31	68
18.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	28	66	94
19.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	51	8	59
20.	Lapas Kelas IIB Waykanan	57	2	59

NO	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
21.	Kanim Kelas III Non Tpi Kalianda	17	2	19
22.	Kanim Kelas II Non Tpi Kotabumi	24	4	28
23.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	44	6	50
24.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	63	9	72
25.	Bapas Kelas II Pringsewu	21	6	27
26.	Bapas Kelas II Kotabumi	16	3	19
27.	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	69	6	75
	JUMLAH	1452	437	1889

Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi Target Kinerja dan Capaian Kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain melaksanakan pembinaan Pemasyarakatan dan Keimigrasian di wilayah, juga berperan penting dalam perjalanan dan perkembangan produk hukum di daerah. Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek. Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, maka kegiatan inventarisasi produk hukum daerah menjadi penting sebagai dasar mengembangkan pengelolaan dan pelayanan *database* produk hukum daerah. Dengan tertatanya *database* diharapkan dapat meningkatkan peran Kantor Wilayah dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kendala saat ini adalah bagaimana pengelolaan dan pelayanan *database* peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor penghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan *database* peraturan perundang-undangan di daerah telah berjalan dengan baik namun terus berusaha maksimal dalam peningkatan layanan hukum di daerah. Serta meningkatnya Kesadaran hukum Masyarakat melalui pembentukan Desa Sadar Hukum.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung selama satu tahun periode tahun 2023, terdapat beberapa Isu Strategis / Permasalahan Organisasi yang dialami antara lain:

Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	Kondisi yang diharapkan	Langkah Strategis
Belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) kab/kota di Provinsi Lampung (beberapa kab/kota tidak memiliki	Tiap Kab/Kota memiliki OBH yang terakreditasi	Melakukan Sosialisasi tentang peraturan pemberian bantuan hukum kepada para OBH dan mendorong OBH untuk mendaftar ke Kanwil Hukum dan HAM

OBH terakreditasi) dan belum optimalnya sinergitas antara OBH dengan Aparat Penegak Hukum dalam pemberian bantuan Hukum	Terbukanya akses seluas-luasnya kepada OBH untuk memberikan Bantuan Hukum oleh APH	Perlu ditingkatkan sinergitas antara OBH dengan Aparat Penegak Hukum serta pejabat/pegawai Lapas/Rutan dalam pemberian bantuan hukum
Belum semua desa di Provinsi Lampung belum mendapat pembinaan terkait desa sadar hukum	Semua desa di Provinsi Lampung mendapat pembinaan terkait desa sadar hukum	Perlu sinergitas dengan Pemerintah daerah dalam pembinaan desa sadar hukum
Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah / Stakeholder terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	Masyarakat, Pemerintah Daerah / Stakeholder memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	Sosialisasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat
Belum sinkronnya data Notaris antara Ditjen AHU dan Kanwil	Sinkronnya Data Notaris pada Ditjen AHU dan Kanwil	Dibangunnya sistem data notaris yang terintegrasi antara Ditjen AHU dan Kanwil
Belum adanya ruang penyimpanan arsip protokol notaris	Kanwil memiliki ruang arsip protokol notaris	Kanwil menyediakan ruang arsip protokol
Masih terjadinya pelanggaran Tatib dalam Lapas/rutan oleh WBP dalam Blok	Lapas/Rutan Zero HP	Lapas/Rutan membutuhkan Alat deteksi untuk mencegah masuknya HP dalam blok hunian
Tiap Kabupaten Kota memiliki Bapas sesuai UU Pas dan KUHP	Lampung Membutuhkan 10 Kantor BAPAS baru	Pengadaan Gedung Kantor BAPAS
Masih adanya kekosongan pejabat Teknis di Kantor Imigrasi	Seluruh pejabat teknis di kantor imigrasi terpenuhi	Pejabat Teknis Imigrasi ditetapkan oleh pejabat pusat agar dapat memenuhi kebutuhan ideal;

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan



Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung , latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung .

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



BAB II. Perencanaan Kinerja



A. Rencana Strategis



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH LAMPUNG 2020-2024





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 – 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.



- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan
2. visi, misi, dan tujuan ;
3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. penutup

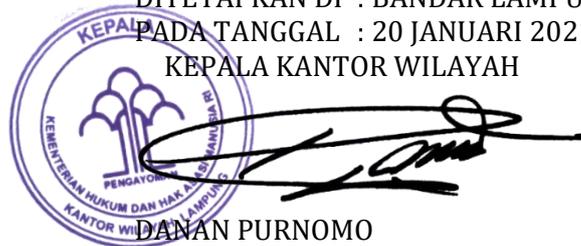




KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH



DANAN PURNOMO
NIP. 19610513 198203 1 001

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;



3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis

biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama)

- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
- e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya dibidang administrasi hukum umum,kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan

- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan

mereka (*collective undertakings*)

- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*)
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dan pemasarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan



waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

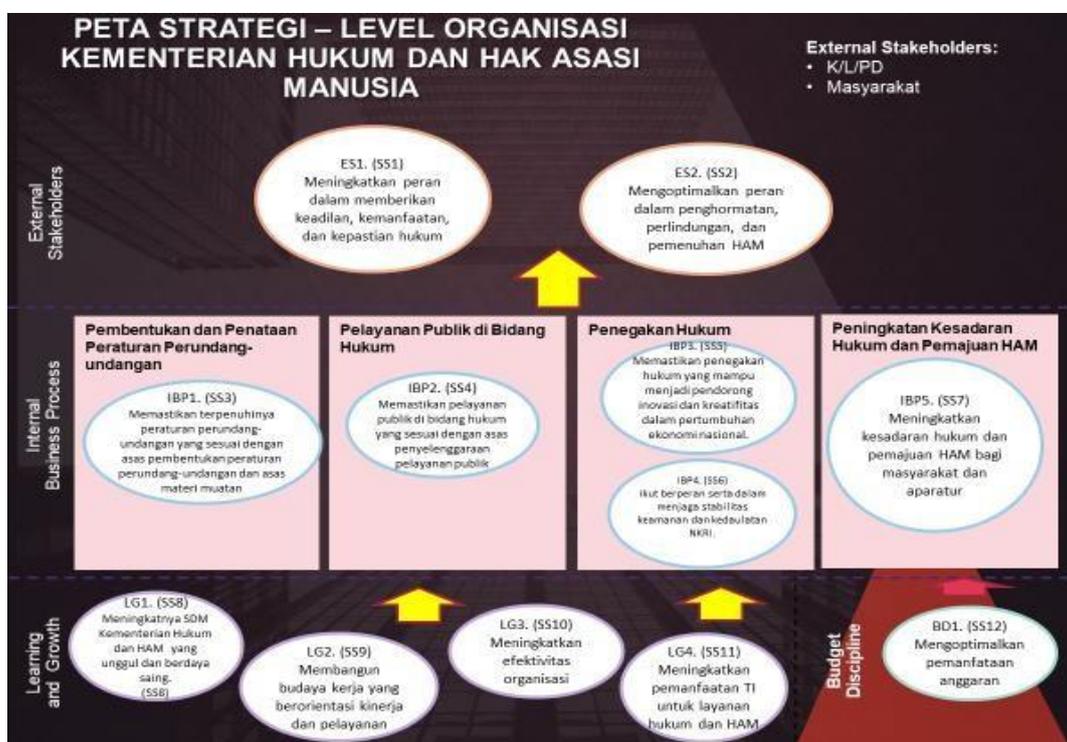
Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan **untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima**, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan **untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan **untuk terlindunginya hak asasi manusia**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan **untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, yang bertujuan **untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan **untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung**

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- SS 1 - *Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan*
- SS 2 - *Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM*
- SS 3 - *Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik*
- SS 4 - *Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.*
- SS 5 - *Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.*
- SS 6 - *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*
- SS 7 - *Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM*
- SS 8 - *Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien*
- SS 9 - *Meningkatkan efektivitas organisasi*
- SS 10- *Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hokum dan HAM*
- Ss 11 - *Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .*



Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)• Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan,	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)• Meningkatkan kesadaran hukum

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			perlindungan dan pemenuhan HAM	dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program pembentukan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham • Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan • Jumlah peningkatan kapasitas dan

						<p>pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Persentase pemutakhiran data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan• Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhiya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat• Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Persentase anggota JDIIH yang berpartisipasi aktif• Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung• Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah• Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none">Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakatMeningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAMjumlah kab/kota peduli HAMJumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	<ul style="list-style-type: none">Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

					<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah • Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPW dan MPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah • Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengembangan Layanan Pemasarakan mendukung SPPT-TI (Output PN) • Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakan yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDP Pemasarakan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI • Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakan berbasis TI • Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI • Indeks Efektivitas Kebijakan Pemasarakan • Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan

						Pemasyarakatan
					<ul style="list-style-type: none">• Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead)• Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Kendaraan Bermotor• Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi• Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran• Jumlah Gedung/Bangunan• Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu• Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan• Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan• Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang	<ul style="list-style-type: none">• Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti

					Teknologi Informasi dan Kerjasama	melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain <ul style="list-style-type: none">Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizinMeningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standarMeningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standarMenurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT PemasarakatanMenurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT PemasarakatanPersentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yangPersentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yangPersentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan sesuai standarPersentase Tahanan dan WBP yang

						mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar• Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas• Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal• Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani• Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar• Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan

					standar (Output PN)	jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
					Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi• Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian• Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian• Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi• Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian• Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah• Indeks Kepuasan Internal di Wilayah• Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah

						<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	<ul style="list-style-type: none"> Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah
	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penurunan residivitas Persentase Klien Pemasarakan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak Persentase benda sitaan dan barang rampasan 		Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakan	Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Pelayanan Tahanan Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

	yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan					
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran • Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) • Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal 	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban • Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan yang diselesaikan • Persentase pencegahan gangguan kamtib • Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Nara pidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib • Persentase pemulihan kondisi keamanan

						pasca gangguan kamtib secara tuntas
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan

an Hukum dan HAM						Pegembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran
					<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat Persentase layanan BMN yang terpetakan

						sesuai kebutuhan <ul style="list-style-type: none"> • Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel • Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar • Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja • Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks teknologi informasi dan komunikasi; • Tingkat downtime penggunaan teknologi 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi

	informasi dan komunikasi					informasi dan komunikasi
--	--------------------------	--	--	--	--	--------------------------

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">• Nilai SMART• Nilai IKPA	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• Nilai SMART• Nilai IKPA	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM• Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).• Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan

sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. KESELARASAN RENCANA STRATEGIS PADA PERJANJIAN KINERJA

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM			Divisi Administrasi
	1. Meningkatnya pelaksanaan layanan Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1.b. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan.	1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien 2. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM 4. Meningkatkan Pemanfaatan TI	

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Untuk Layanan Hukum dan HAM 5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien	
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan			Divisi Pemasarakatan
	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah.	1.a. Indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah.	1. Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
	2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.	2.a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar; 2.b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas; 2.c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal; 2.d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani; 2.e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar; 2.f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar; 2.g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah	2. Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI.	

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh); 2.h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.		
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	3.a. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying; 3.b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; 3.c. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.		
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	4.a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian; 4.b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi; 4.c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi; 4.d. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan; 4.e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin;		

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4.f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi; 4.g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.		
	5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	5.a. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya; 5.b. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap.		
	6. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	6.a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar; 6.b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah; 6.c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib; 6.d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		
	7. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	7.a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga; 7.b. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara; 7.c. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya.		
	8. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	8.a. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat; 8.b. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi;		

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8.c. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar; 8.d. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal.		
	9. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas / Rutan / Bapas / LPKA / Rupbasan		
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			Divisi Keimigrasian
	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1.a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah; 1.b. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI	
4	Program Pelayanan Hukum dan HAM			Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	1. Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas Pembentukan peraturan perundang-undangan	
	2. Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	2. Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM	
	3. Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3. Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
	4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	4.a. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah; 4.b. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah.	4. Melaksanakan Penegakan Hukum Yang	

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	7.a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM; 7.b. Jumlah Kab/kota peduli HAM; 7.c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM.		
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah		
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	9.a. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan; 9.b. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda.		
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah		
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	11.a. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi; 11.b. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi.		

No	Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	12. Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah		
	13. Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti		

Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

- Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi
- Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun
- Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi
- Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*)
- Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut
- Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
- Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law)

- Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
- Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi
- Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024
- Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN)

Strategi :

1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik
- Pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat

2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
- Membuat kebijakan yang ramah investasi
- Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
 - Pembentukan Kantor Imigrasi baru
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait
 - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*)
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan2. Meningkatkan efektivitas organisasi3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Reformasi Birokrasi2. Indeks efektifitas organisasi3. Nilai SMART4. Nilai IKPA
2	Ditjen PP	<ol style="list-style-type: none">1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
3	Ditjen AHU	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)4. Persentase menurunnya residivis;5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ditjen Imigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal3. Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual2. Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual3. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual4. Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi5. Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks maturitas SPIP2. Opini Audit External atas Laporan Keuangan3. Indeks Persepsi integritas
9	BPHN	<ol style="list-style-type: none">1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan2. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

			4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
10	Balitbang Hukum dan HAM	1. Meningkatkan efektivitas organisasi	1. Indeks efektifitas organisasi 2. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

B. Perjanjian Kinerja

1. Divisi Administrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.601.201.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.601.201.000,-

2. Divisi Pemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80% 80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	60% 55% 35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80% 100% 90% 90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85% 80% 85% 80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85% 80% 85% 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.664.356.000.-

3. Divisi Keimigrasian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.276.068.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.276.068.000,-

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.112.319.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp.3.416.092.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.535.857.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.160.370.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 374.187.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.232.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142.187.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 233.073.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp.233.073.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-



A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk *Laporan Kinerja*. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:



Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

Berikut Kami Sampaikan Capaian Kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :

a. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				2022	2023
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,94	3,90
Keterangan		Pelaksanaan Layanan telah terlaksana dengan sangat baik dengan capaian 3,90 dari skala nilai 4,00 dan nilai diperoleh menggunakan aplikasi survey milik Balitbang Hukum dan HAM yaitu aplikasi <i>3AS Survey Management</i>			

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.601.201.000,- <i>Revisi:</i> Rp. 22,723,570,000,-	Rp. 22,113,640,636,- (97,32%)
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.601.201.000,- <i>Revisi:</i> Rp. 22,723,570,000,-	Rp. 22,113,640,636,- (97,32%)

b. Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				2022	2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82		85
2		1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	98%	99%

	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	87%	95%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	81%	95%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,84%	80%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	98,97%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	95,97%	87%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	50,95%	86%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	96,82%	20%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	47,09%	40%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	93,41%	85%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	91,92%	91%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	71%	89%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	79,88 %	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	52,49 %	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	67,50 %	60%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100 %	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	100%

		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100 %	95%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100 %	91%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100 %	100%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	96 %	100%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	91 %	95%
		3. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %	100%
8	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan peningkatan kualitas Hidup Narapidanan Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Pesentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%		100%
		2. Persentase tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal	97%		100%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		95%
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 664.356.000,-	Rp 664.356.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 664.356.000,-	Rp 664.356.000
Koordinasi dilkumjakpol	Rp.48.272.000,-	Rp.48.271.500,-
Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan	Rp .50.715.000,-	Rp.50.713.886,-
Koordinasi Teknis Pemasarakatan	Rp.16.380.000,-	Rp.11.770.790
Pameran Hasil Karya Narapidana	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
Monitoring dan Evaluasi	Rp. 136.160.000,-	Rp.70.454.000,-
Sosialisai Teknis Penyelenggaraan Pemasarakatandi Wilayah	Rp. 125.813.000,-	Rp.108.036.368

Layanan Kerjasama, Perizinan, Pengaduan dan Informasi	Rp. 57.916.000,-	Rp. 57.916.000,-
Pencegahan dan Penindakan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 161.780.000,-	Rp. 161.780.000,-
Pemindahan WBP	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	Rp. 46.570.000,-	Rp. 46.570.000,-

Keterangan Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

- 2.1. Jumlah tahanan overstaying / Jumlah tahanan x 100%
- 2.2. Jumlah tahanan memperoleh layanan penyuluhan hukum / Jumlah tahanan x 100%
(2027 / 2133 x 100% = 95 %)
- 2.3. Jumlah tahanan memperoleh fasilitasi bantuan hukum / Jumlah tahanan x 100%
(2027 / 2133 x 100% = 95 %)

- 3.1. Jumlah narapidana memperoleh predikat baik/ jumlah narapidana yang dinilai x 100 %
(4762 / 5348 x 100% = 89 %) Beberapa narapidana baru belum mau terbuka kepada wali Pas, setelah beberapa minggu / bulan mulai menunjukkan perubahan perilaku
- 3.2. Jumlah Narapidana yang mendapatkan SK remisi / Jumlah narapidana yang diusulkan remisi x 100% (TIDAK ada kendala)
- 3.3. Jumlah Narapidana yang mendapatkan SK integrasi / Jumlah narapidana yang diusulkan Integrasi x 100% (87%) (Hal ini dikarenakan narapidana belum NKRI, tidak ada penjamin, dan narapidana mendapat Register F)
- 3.4. Jumlah Anak yang mengikuti pendidikan / jumlah anak x 100% (85/98 x 100% = 86%)
Ada syarat untuk melanjutkan sekolah yaitu, ijazah terakhir dan rapot terakhir, jika tidak bisa melanjutkan untuk smp/ sma, untuk Paket A bisa. Ada beberapa anak yang tidak sesuai jurusan sekolah sma/smk terdahulu yang tidak ingin melanjutkan.

- 4.1. Jumlah Basan/Baran register dalam Konsi baik x 100% Jumlah Register unit
(12841 / 14112 x 100% = 91 %)
- 4.2. Jumlah Basan/Baran keluar / Jumlah Register Inkrah x 100%
(17400 / 19551 x 100% = 89%)

- 6.1. Jumlah Anak yang terampil / Jumlah Anak yang mengikuti Pendidikan Keterampilan x 100% = 56 /70 x 100% = 80%
- 6.2. Jumlah Andikpas yang sudah keluar SK / Jumlah Andikpas yang memperoleh hak integrasi x 100% = 128/ 128 x 100% = 100 %

- 6.3. Jumlah Anak yang memperoleh hak pengasuhan / Jumlah Anak x 100% = 93 / 98 x 100% = 94,9%
- 6.4. Jumlah anak yang memperoleh hak pendidikan formal dan non formal / Jumlah anak x 100% = 89 / 98 x 100% = 91%
- 7.1. Jumlah Presentase 16 UPT pengaduan yang diselesaikan / 16 = 100%
- 7.2. Jumlah Presentase 16 UPT Pencegahan gangguan kamtib / 16 = 100%
- 7.3. Jumlah Presentase 16 UPT kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertiboleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib / 16 = 100%
- 7.4. Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas / Jumlah Gangguan Kamtib X 100% = 100%
- 8.1. Jumlah Rata-Rata Pemenuhan Layanan Makan (tahanan/Narapidana/ Anak) / Jumlah Rata-Rata (tahanan/Narapidana/ Anak) x 100% (5348 / 5348 x 100% = 100%)
- 8.2. Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak) mendapatkan layanan kesehatan secara berkualitas / Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak) x 100% (5348 / 5348 x 100% = 100%)
- 8.3.
$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan Maternal}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

= 45/45 x 100% = 100%
- 8.4. Penanganan Gangguan Mental = A / B x 100%
- Keterangan :**
- A = Jumlah Tahanan/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- B = Jumlah Tahanan/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental
- 8.5. Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak/ lansia) mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak/ lansia) x 100% (5348/5348 x 100% = 100%)

c. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,46	3,94
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	4,57	3,61

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.276.068.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.276.068.000,-

Keimigrasian Lampung menerima ABT periode I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 452.610.000,- (Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga pagu menjadi Rp. 1.482.621.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

No.	Satuan Kerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Realisasi Kinerja 2022			Realisasi Kinerja 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Divisi Keimigrasian Lampung	3,20	3,96	123,75	3,25	3,94	121,23
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,20	3,94	123,13	3,25	3,96	121,85
3.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	3,20	4,00	125	3,25	3,93	120,92
4.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	3,20	3,96	123,75	3,25	3,92	120,61

Capaian Kinerja Tahun 2023 : $\frac{3,61}{3,13} \times 100\% = 115,33\%$

Berikut ini ada tabel nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) 2023 pada satuan Kerja Imigrasi di Wilayah Lampung

No.	Satuan Kerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,13 Indeks	3,82 Indeks	122,04
2.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	3,13 Indeks	3,75 Indeks	119,81
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	3,13 Indeks	3,57 Indeks	114,06

d. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi		
				(1)	(2)	(3)
					2022	2023
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	21,5%	120%	
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%		100%	
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%	116%	
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan	108 Layanan	83 Layanan	
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	40%	90%	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Pusat	Pusat	
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	94%	
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	25 Orang	30 Orang	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi		
				(1)	(2)	(3)
					2022	2023
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	94,07%	99,91%	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	98,89%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	Pusat	78,26	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	70%	
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	20%	
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	16 Instansi Pemerintah	16 Instansi Pemerintah	
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	12 Instansi Pemerintah	12 Instansi Pemerintah	
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.112.319.000,-	Rp. 6.513.977.607,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp.3.416.092.000,-	Rp. 3.354.709.092,- (98,20%)
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.535.857.000,-	Rp. 1.534.986.850,- (99,94%)
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.160.370.000,-	Rp. 1.624.281.665,- (99,31%)
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 374.187.000,-	Rp. 331.047.881,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.232.000.000,-	Rp.215.801.835 (93,02%)
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142.187.000,-	Rp.115.246.046 (81,05 %)
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 233.073.000,-	Rp. 230.186.564,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp.233.073.000,-	Rp. 230.186.564,- (98,76%)
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-	Rp. 200.415.809,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-	Rp. 200.415.809,- (99,90 %)

Keterangan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

1.1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%

$$\frac{11.102.227.550 - 10.461.550.000}{10.573.550.000} \times 100\% = 0,6\%$$

$$\frac{0,6\%}{5\%} \times 100\% = 120\%$$

2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

- 2.1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%

$$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi dibagi target dikali 100%

$$\frac{100}{86} \times 100\% = 116\%$$

B. Realisasi Anggaran

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	KET
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.601.201.000	Rp. 22.723.570.000	Rp. 22.179.664.607 (97,61 %)	Terjadi perubahan anggaran karena ABT belanja sewa dan belanja pegawai
5252 - Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 664.356.000	Rp. 664.356.000	Rp. 656.424.424 (98,81 %)	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.030.011.000	Rp. 1.482.621.000	Rp. 1.469.884.552 (99,14 %)	Terjadi perubahan anggaran karena ABT
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.416.092.000	Rp. 3.416.092.000	Rp. 3.354.709.092 (98,20 %)	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.535.857.000	Rp. 1.535.857.000	Rp. 1.534.986.850 (99,94 %)	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 232.000.000	Rp. 232.000.000	Rp. 216.751.835 (93,43 %)	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 233.073.000	Rp. 233.073.000	Rp. 230.186.564 (98,76 %)	
5256 - Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142.187.000	Rp. 142.187.000	Rp. 133.703.446 (94,03 %)	
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.160.370.000	Rp. 1.635.490.000	Rp. 1.624.281.665 (99,31 %)	Terjadi perubahan anggaran karena tidak tercapai target OBH, sehingga anggaran dialihkan oleh UKE I ke Kanwil lain
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000	Rp. 200.621.000	Rp. 200.415.809 (99,90 %)	

Penyebab Kegagalan beserta penjelasan dan Strategi merealisasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2. Penyebab capaian kinerja dan/atau realisasi anggaran tidak tercapai pada tahun 2023

Penjelasan Kanwil :

Terkait pelaksanaan kinerja dan anggaran secara keseluruhan terlaksana dengan baik dan optimal selama tahun anggaran 2023. namun terdapat 1 kegiatan pada divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung pada kegiatan (4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah) yang terjadi revisi anggaran yang semula Rp. 2.160.370.000 menjadi Rp. 1.635.490.000 yang direvisi langsung oleh UKE 1 Pengampunya dengan alasan

diwilayah Lampung minimnya permasalahan hukum yang sampai ke tahap banding atau kasasi sehingga OBH sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. dengan alasan tersebut maka terindikasi anggaran tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga UKE 1 pengampunya melakukan revisi anggaran untuk dialokasikan ke kanwil lainnya.

Langkah Strategis :

Perlu dilakukan revisi LKjIP sesuai dengan diskusi dan rekomendasi kegiatan Penelitian Laporan Kinerja Kanwil Lampung. Tingkatkan kinerja yang sudah berhasil tercapai di tahun 2023 dan untuk IKK yang tidak tercapai di tahun 2023 seperti contohnya “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” yang tidak tercapai karena masih dalam proses penanganan saat pelaporan dilakukan, perlu untuk dijelaskan alasan tidak tercapainya di LKjIP tahun 2023 dan kembali dilaporkan progres dan hasilnya di LKjIP tahun 2024.

3. Yang menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2023

Penjelasan Kanwil :

Masih belum tercapainya persamaan persepsi dalam mekanisme perhitungan dan penyampaian data capaian dari target masing-masing indikator yang telah ditetapkan. dan pada saat pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan LKjIP Tingkat Wilayah ingin menghadirkan Narasumber dari masing-masing UKE 1 Pengampu Program pada divisi dan upt, utamanya diharapkan dapat mengundang Narasumber dari Dirjen Pemasarakatan, Dirjen Imigrasi, ITJEN dan Biro Perencanaan untuk dapat hadir bersama dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan LKjIP tingkat wilayah, namun kendalanya tidak adanya mata anggaran untuk narasumber seperti biaya perjalanan, biaya penginapan dan uang harian narasumber untuk menghadirkan narasumber secara langsung di wilayah. dan tidak dapat diusulkan untuk mata anggaran tersebut karena tidak ada didalam postur.

Pada masing-masing divisi jika akan dilakukan rotasi pegawai dalam menunjang kinerja organisasi, utamanya pada pegawai penyusun laporan belum berjalannya proses transfer ilmu tentang mekanisme penyusunan laporan dan bagaimana perhitungan dan penyajian data kinerja sehingga terwujudnya inkonsistensi data pada laporan yang disusun.

Masih tersajinya data yang inkonsistensi pada laporan yang diindikasi karena adanya level reuiu yang terlewat pada tingkat wilayah yang seharusnya dilakukan validasi berjenjang pada data kinerja yang akan disajikan dalam laporan.

Langkah Strategis :

Mencantumkan permasalahan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

Membuat mekanisme transfer ilmu bagi para pegawai yang dilakukan rotasi kepada para pegawai baru. Memastikan mekanisme tersebut dapat membuat pegawai baru dapat menyusun laporan dengan baik walaupun sering terjadinya rotasi pegawai.

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan Unit-unit pengampu seperti misalnya Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi.

Perlunya dilakukan reuiu LKjIP secara berjenjang agar tidak terdapat data yang tidak konsisten dalam laporan.

4. Strategi yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2023

Penjelasan Kanwil :

Untuk tercapainya persamaan persepsi penyusunan laporan dan konsistensi pada data yang disajikan pada laporan maka kantor wilayah mengupayakan hadirnya narasumber melalui virtual zoom, namun pada pelaksanaannya tidak efisien karna keterbatasan waktu untuk zoom dan tidak terjadinya diskusi secara langsung tatap muka yang lebih mendetail. sehingga kantor wilayah berharap dapat munculnya anggaran narasumber pada kegiatan pendampingan penyusunan LKjIP tingkat Wilayah pada Postur.

Langkah Strategis :

Mencantumkan permasalahan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan unit-unit pengampu seperti misalnya Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi.

5. Strategi untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penjelasan Kanwil :

Lebih mengoptimalkan dan memastikan terjadinya reviu dan validasi data pelaksanaan kinerja secara berjenjang yang akan disajikan pada laporan.

Melakukan transfer ilmu tentang mekanisme penyusunan laporan dan bagaimana perhitungan dan penyajian data kinerja sehingga terwujudnya konsistensi data pada laporan yang disusun jika pelaksana penyusun laporan akan berpindah tugas ke tempat yang lain agar pelaporan tetap tersusun dengan baik sebagai wujud akuntabilitas organisasi.

Mengupayakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja tingkat wilayah yang menghadirkan secara langsung Narasumber dari ITJEN, Biroperencanaan, Dirjen Pemasarakatan dan Dirjen Imigrasi sehingga dapat terlaksana dengan maksimal dalam penyelesaian kendala-kendala yang ditemui saat penyusunan laporan serta mekanisme penyajian data yang valid dan konsisten.

Langkah Strategis :

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan unit-unit pengampu seperti misalnya Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi terutama terkait dengan rumus perhitungan.

Kanwil harus melakukan monitoring kepada seluruh satker secara rutin dan intensif terkait realisasi dan capaian PK tahun 2024.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Kanwil dan UPT serta Meningkatkan koordinasi antar divisi dan instansi terkait.

Laksanakan seluruh strategi yang tertuang dalam BA ini dengan sebaik-baiknya.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ESEKON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA			TARGET
				PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%	
				(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	01	408824	DIVISI ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL	13.929.021,000	13.541.631,297	387.389,703	97,32%	8.012,418,000	7.795.544,089	216.873,911	97,30%	782.131,000	773.055,250	6.485,750	97,67%	22.223.570,000	22.111.666,639	97,15%	98,00
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM	13.929.021,000	13.541.631,297	387.389,703	97,32%	8.012,418,000	7.795.544,089	216.873,911	97,30%	782.131,000	773.055,250	6.485,750	97,67%	22.223.570,000	22.111.666,639	97,33%	98,00
03	408822		DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	0	0	0	0,00%	3.418.092,000	3.420.040,939	90.951,061	97,39%	0	0	0	0,00%	4.418.092,000	4.420.040,939	97,30%	98,00
07	408822		DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0	0	0,00%	1.535.857,000	1.531.909,870	3.947,130	99,74%	0	0	0	0,00%	1.535.857,000	1.531.909,870	99,74%	98,00
08	408827		DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0,00%	232.000,000	213.141,835	18.858,165	91,87%	0	0	0	0,00%	232.000,000	213.141,835	91,87%	98,00
09	408826		DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0,00%	233.073,000	227.966,164	5.106,836	97,81%	0	0	0	0,00%	233.073,000	227.966,164	97,81%	98,00
30	408829		BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	0	0	0	0,00%	1.772,697,000	1.750.883,111	21.813,889	98,77%	5.000,000	5.000,000	0	100,00%	1.777,697,000	1.750.883,111	98,77%	98,00
11	408831		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0,00%	200,621,000	197,339,609	3.281,391	98,30%	0	0	0	0,00%	200,621,000	197,339,609	98,30%	98,00
3			DIVISI PEMASYARAKATAN	0	0	0	0,00%	7.390.330,000	7.247.283,528	143.046,472	98,08%	5.000,000	5.000,000	0	100,00%	7.395.330,000	7.252.283,528	98,07%	98,00
05	408823		DITJEN PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	0	0	0	0,00%	664.356,000	645,679,424	18.676,576	97,20%	0	0	0	0,00%	664.356,000	645,679,424	97,20%	98,00
02	408843		LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	10.726.488,000	10.708.535,830	17.952,170	99,83%	13.259.294,000	13.205.182,718	54.111,282	98,84%	0	0	0	0,00%	22.685.782,000	22.913.718,348	99,27%	98,00
05	408825		LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8.728.831,000	8.639.363,281	89.467,719	98,98%	9.835.062,000	8.855,062,305	984.999,695	91,10%	0	0	0	0,00%	17.848,089,000	17.484,425,544	98,00%	98,00
05	497764		LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.435.171,000	5.401,377,600	33.793,400	99,30%	3.300,822,000	3.037,339,823	263,482,177	98,06%	0	0	0	0,00%	8.533,993,000	8.438,717,489	98,89%	98,00
05	408828		LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	8.237.873,000	8.227.400,923	10.472,077	99,93%	8.235.885,000	6.670,831,760	1.565.053,240	80,94%	0	0	0	0,00%	13.239.718,000	12.298.232,723	92,89%	98,00
05	408530		LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	4.720,000,000	4.740,083,054	9.972,344	99,99%	7.428,087,000	7.366,101,012	61,985,988	99,17%	1.348,099,000	1.314,972,212	33,728,788	97,62%	13.728,842,000	13.021,465,978	99,23%	98,00
05	408530		LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3.572,678,000	3.504,754,019	67,923,981	98,10%	3.882,432,000	3.983,182,759	10,249,241	99,52%	0	0	0	0,00%	7.555,110,000	7.487,936,778	98,85%	98,00
05	408531		LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3.950,441,000	3.841,398,325	9,042,675	97,97%	5.278,730,000	5.313,522,386	30,207,614	99,88%	0	0	0	0,00%	9,229,171,000	9,228,920,211	99,93%	98,00
05	497758		LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3.524,933,000	3.324,933,000	200,000,000	93,20%	3.284,143,000	3.190,649,581	93,533,419	98,38%	0	0	0	0,00%	8.569,115,000	8.485,090,064	99,07%	98,00
05	683313		LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUKIH	4.027,825,000	4.009,499,677	18,325,323	99,79%	6.383,977,000	6.385,154,532	17,811,478	99,77%	200,198,000	199,847,000	70,000	99,87%	10,608,999,000	10,577,611,139	99,68%	98,00
05	683704		LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.156,834,000	4.097,218,264	59,615,736	98,57%	3.071,980,000	3.024,144,277	47,835,723	99,42%	0	0	0	0,00%	7,228,694,000	7,121,363,041	98,51%	98,00
05	683073		RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.875,583,000	7.875,583,000	0	100,00%	10,218,771,000	10,087,149,300	131,621,700	98,71%	0	0	0	0,00%	16,694,454,000	17,889,828,008	98,82%	98,00
05	408570		RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3.476,030,000	3.450,549,041	25,480,959	99,37%	4.340,028,000	4.333,188,541	6,839,459	99,84%	3.363,907,000	3.355,764,248	7,742,752	99,67%	10,185,905,000	10,147,482,230	99,63%	98,00
05	408570		RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	6.150,180,000	6.145,830,653	4,349,347	99,92%	7,929,858,000	7,756,172,285	2,683,675	99,06%	0	0	0	0,00%	8,109,268,000	8,100,602,725	99,94%	98,00
05	408531		RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.123,156,000	3,098,993,105	24,162,895	99,58%	2,125,125,000	2,118,438,212	6,686,788	97,20%	0	0	0	0,00%	5,298,115,000	5,211,466,421	98,35%	98,00
05	497742		RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.429,201,000	3,428,843,991	357,009	99,99%	3,478,448,000	3,460,347,801	18,100,199	97,77%	0	0	0	0,00%	6,537,649,000	6,529,291,792	98,77%	98,00
05	683990		RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.750,776,000	2,697,877,738	52,898,262	98,07%	3,283,000,000	3,183,494,218	99,911,782	99,89%	0	0	0	0,00%	5,933,762,000	5,881,174,929	99,13%	98,00
05	109137		BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	6.206,947,000	6,096,266,698	110,680,302	98,09%	1,006,108,000	1,008,684,612	9,423,388	99,14%	0	0	0	0,00%	3,803,083,000	3,778,951,011	99,38%	98,00
05	653129		BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3.654,914,000	3,561,069,702	93,844,298	97,43%	821,296,000	800,489,000	20,807,000	97,47%	3,367,000,000	3,360,840,920	6,159,080	99,89%	5,843,120,000	5,722,399,622	98,77%	98,00
05	632015		BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	1,079,837,000	1,065,248,085	14,588,915	98,68%	1,084,824,000	1,023,946,011	11,277,989	98,92%	0	0	0	0,00%	2,114,461,000	2,089,792,087	98,89%	98,00
05	632017		BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSUWU	1,711,024,000	1,699,794,907	11,229,093	99,34%	997,158,000	997,158,000	0	100,00%	977,000,000	973,338,800	4,311,200	98,86%	3,686,509,000	3,686,489,731	99,83%	98,00
05	632023		RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2.027,907,000	1,992,038,904	35,868,096	98,81%	667,233,000	595,957,911	70,285,089	89,47%	0	0	0	0,00%	2,734,830,000	2,588,996,813	95,01%	98,00
05	632300		RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1.472,322,000	1,457,147,809	15,174,191	98,97%	540,403,000	435,456,500	104,946,500	80,38%	0	0	0	0,00%	2,012,725,000	1,892,604,469	94,03%	98,00
05	632024		RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	1.055,457,000	1,027,361,848	28,095,152	97,34%	997,055,000	575,991,000	421,064,000	98,80%	0	0	0	0,00%	1,600,512,000	1,603,324,848	97,14%	98,00
3			DIVISI KEMIGRASIAN	94.995,144,000	93,961,659,881	793,484,119	99,16%	90,768,920,000	94,462,428,807	1,306,501,193	98,60%	8.857,054,000	8,804,863,180	52,190,820	99,47%	200,161,180,000	198,168,951,428	99,04%	98,00
06	408823		DITJEN IMIGRASI	0	0	0	0,00%	1,482,621,000	1,480,893,749	1,727,251	99,94%	0	0	0	0,00%	1,482,621,000	1,480,893,749	99,94%	98,00
06	408105		KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.320,826,000	4,514,318,673	6,509,327	99,89%	6,372,618,000	6,371,116,207	1,501,791	99,98%	814,999,000	813,729,000	1,270,000	99,84%	11,708,400,000	11,699,161,880	99,92%	98,00
06	109157		KANTOR IMIGRASI KELAS II KALIANDA	1.171,901,000	1,160,196,403	5,704,597	99,51%	3,125,000,000	2,892,505,472	332,494,528	92,29%	276,436,000	271,172,590	5,263,410	98,82%	4,483,777,000	4,311,936,644	96,61%	98,00
06	683111		KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.253,207,000	1,240,210,670	13,000,330	99,14%	1,270,000,000	1,268,000,000	2,000,000	99,84%	4,338,751,000	4,363,147,449	11,693,121	99,64%	9,093,483,000	9,043,674,764	99,29%	98,00
6			SUB TOTAL	7,246,436,000	7,220,735,754	25,700,246	99,62%	14,001,718,000	13,880,883,484	170,834,516	98,79%	5,450,180,000	5,430,049,439	20,135,561	99,63%	26,758,340,000	26,541,688,677	99,19%	98,00
TOTAL KESELURUHAN				115,870,001,000	114,604,026,432	1,265,974,568	98,90%	125,213,388,000	123,396,939,568	1,816,448,432	98,55%	10,094,371,000	10,015,577,809	78,793,191	99,51%	257,178,360,000	254,076,544,269	98,79%	98,00

sumber: <http://spantit.kemenkumham.go.id>

04 Januari 2024 pukul 15.40 WIB

REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI	% TARGET	% DEVIASI
1	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3,416,092,000	3,326,040,939	90,051,061	97,36	98,00	9,43
2	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	8,109,283,000	8,104,602,795	4,680,205	99,94	98,00	1,94
3	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	11,708,460,000	11,699,163,880	9,296,120	99,92	98,00	1,92
4	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	9,275,194,000	9,256,916,221	18,277,779	99,80	98,00	1,80
5	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,535,857,000	1,531,909,870	3,947,130	99,74	98,00	1,74
6	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUKIH	10,606,999,000	10,572,611,199	34,387,801	99,68	98,00	1,68
7	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	10,185,565,000	10,147,482,230	38,082,770	99,63	98,00	1,63
8	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	5,801,083,000	5,776,945,613	24,137,387	99,58	98,00	1,58
9	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	9,083,482,000	9,043,674,584	39,807,416	99,56	98,00	1,56
10	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	12,373,718,000	12,298,223,753	75,494,247	99,39	98,00	1,39
11	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	13,726,842,000	13,621,465,878	105,376,122	99,23	98,00	1,23
12	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	22,085,782,000	21,913,718,349	172,063,651	99,22	98,00	1,22
13	497758	LEMBAGA PEMASYAR						

C. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja SMART DJA

NO	SATUAN KERJA	NILAI SMART	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG	94,57	97,67	71,39	100	20	100
2	KANIM KELAS III NON TPI KALIANDA	94,06	90,31	96,48	100	13,9	84,75
3	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	92,52	99,24	99,45	100	9,78	74,46
4	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	92,05	85,79	98,35	97,16	12,95	82,38
5	RUPBASAN KELAS II METRO	90,89	92,99	99,32	100	8,38	70,96
6	RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	88,03	97,14	99,57	100	3,75	59,39
7	KANWIL-DITJEN HAM	87,99	96,09	99,32	100	3,91	59,77
8	KANWIL-SEKRETARIAT JENDERAL	87,72	96,3	98,52	100	3,7	59,26
9	KANWIL-DITJEN PEMASYARAKATAN	87,18	97,19	98,56	100	2,81	57,03
10	KANWIL-DITJEN IMIGRASI	86,6	98,98	99,24	100	1,6	53,99
11	LAPAS KHUSUS NARKOTIKA	86,58	96,95	99,75	99,14	2,23	55,57
12	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	86,57	97,72	99,29	99,79	1,83	54,57
13	BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	86,34	98,94	99,89	100	1,06	52,66
14	BAPAS KELAS II KOTABUMI	85,94	98,11	94,43	100	2,01	55,03
15	KANWIL-DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	85,85	99,74	99,97	100	0,26	50,64
16	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA B LAMPUNG	85,43	97,27	99,08	97,93	1,49	53,73
17	KANIM KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	85,36	98,06	99,84	95,26	2,71	56,77
18	LAPAS KELAS IIA METRO	85,19	98,3	99,85	96,65	1,6	53,99
19	KANWIL-DITJEN PP	84,76	91,87	97,16	95,5	3,25	58,12
20	KANWIL-BPHN	84,7	98,77	99,26	99,21	-0,56	48,6
21	RUTAN KELAS IIB SUKADANA	84,5	99,51	91,74	100	0,49	51,23
22	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	83,94	97,99	97,11	97,97	-0,21	49,47
23	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	83,39	96,96	99,65	100	-2,73	43,17
24	KANIM KELAS II NON TPI KOTABUMI	81,29	95,49	98,5	90,73	0,46	51,15
25	BAPAS KELAS II METRO	74,75	96,48	96,52	71,77	3,22	58,05
26	RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	69,92	97,6	96,2	45,19	12,57	81,42
27	KANWIL-BALITBANG HAM (BSK)	65,34	98,36	98,56	81,65	-16,71	8,21
28	KANWIL-DITJEN AHU	59,35	97,36	99,47	73,11	-20	0
29	BAPAS KELAS II PRINGSEWU	57,8	96,9	98,52	36,27	0,56	51,39
30	LAPAS KELAS IIB WAY KANAN	53,16	98,12	99,71	27,84	-1,28	46,8
31	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	51,97	98,7	99,61	23,91	-0,61	48,48
32	LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG	32,66	97,97	95,02	13,49	-20	0
33	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	29,59	97,6	99,72	4,53	-20	0
34	RUTAN KELAS IIB KRUI	29,47	97,56	99,07	4,54	-20	0
35	RUTAN KELAS IIB MENGGALA	29,42	98,74	99,42	4,01	-20	0
	JUMLAH	75,57	96,94	97,64	78,73	-0,22	49,46

Nilai kinerja anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada *dashboard* masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. **Capaian Rincian Output (CRO) (bobot 43,5%)** dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara capaian dan target indikator, dari 35 satker sebanyak 4 satker yang memperoleh nilai CRO <10% sedangkan nilai tertinggi ada satker yaitu Rupbasan Kotabumi, LPKA Bandar Lampung, Bapas Metro, Kanwil-Ditjen KI, dan Kanwil-Ditjen HAM dengan nilai capaian RO sebesar 100%.
2. **Efisiensi (bobot 28,6%)** dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Terdapat 2 (dua) satuan kerja yang memperoleh nilai efisiensi 100%, namun sebanyak 11 (sebelas) satker memperoleh nilai efisiensi terendah yaitu 0%. Meningkatkan nilai efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK (melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa anggaran berarti harus mengondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi;
3. **Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan (bobot 18,29%)** dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana komulatif. Pada variabel ini hampir seluruh satuan kerja memperoleh nilai >70% hanya 1 (satu) satuan kerja yang nilai <70% yaitu LPKA Kelas II Bandar Lampung;
4. **Penyerapan anggaran (bobot 9,7%)** diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Pada Triwulan IV, realisasi anggaran terdapat 2 (dua) satker yang sudah diatas 90%, tetapi masih terdapat ada 4 (empat) satker yang masih dibawah 80%. Seluruh satker segera melakukan Monitoring dan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan anggaran agar realisasi/penyerapan anggaran dapat mencapai nilai optimal.

D. Capaian Kinerja Lainnya

a. E-Performance

Laporan Input Data Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran periode Januari - Desember Tahun Anggaran 2023 input aplikasi E-Performance hanya dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan dan Imigrasi di Wilayah Lampung *Tidak dapat dilakukan input* aplikasi E-Performance Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Aplikasi E-Performance masih dalam tahap ***Maintenance Website Pasca Development*** dan jaringan yang digunakan menggunakan jaringan internet terpadu hanya dapat di akses melalui jaringan internet Pusdatin yang hanya tersedia di Kantor wilayah sesuai informasi yang telah disampaikan oleh PAP Biro Perencanaan dan Pusdatin Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

b. E-Monev BAPPENAS

DATA SATKER PENGINPUTAN E-MONEV BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2023

A. DATA KOMPONEN

NO.	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KET.
1.	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Ditjen Pemasaryakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Ditjen Imigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Ditjen AHU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Ditjen Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Ditjen HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Balitbang HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Ditjen PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Lapas Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Lapas Khusus Narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Lapas Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Lapas Kelas IIA Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Lapas Kelas IIA Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15.	Lapas Kelas IIA Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Lapas Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Lapas Kelas IIB Way Kanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

18.	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Rutan Kelas IIB Menggala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22.	Rutan Kelas IIB Krui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	Rutan Kelas IIB Sukadana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	Bapas Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27.	Bapas Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28.	Bapas Kelas II Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29.	Bapas Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Rupbasan Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34.	Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35.	Kanim Kelas III Non TPI Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : <https://e-money.bappenas.go.id/>

c. IPK - IKM Kantor Wilayah beserta Jajaran

2023	SUMMARY 2023		
SATUAN KERJA	AVG RESP	AVG IKM	AVG IPK
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	64.67	16.95 / 3.87 / 96.87	17.05 / 3.90 / 97.41
KANIM BANDAR LAMPUNG	99.17	17.31 / 3.96 / 98.90	17.31 / 3.96 / 98.90
KANIM KOTABUMI	135.00	17.35 / 3.96 / 99.12	17.35 / 3.96 / 99.12
KANIM KALIANDA	36.67	17.16 / 3.92 / 98.06	17.17 / 3.93 / 98.13
LAPAS BANDAR LAMPUNG	33.58	17.49 / 4.00 / 99.93	17.48 / 4.00 / 99.88
LAPAS KALIANDA	31.08	17.42 / 3.98 / 99.53	17.41 / 3.98 / 99.47
LAPAS KOTABUMI	38.00	17.42 / 3.98 / 99.53	17.42 / 3.98 / 99.53
LAPAS METRO	25.67	17.21 / 3.93 / 98.37	17.19 / 3.93 / 98.23
LAPAS GUNUNG SUGIH	37.67	17.38 / 3.97 / 99.31	17.38 / 3.97 / 99.31
LAPAS KOTA AGUNG	34.00	16.96 / 3.88 / 96.94	17.10 / 3.91 / 97.72
LAPAS WAY KANAN	29.42	17.30 / 3.95 / 98.86	17.31 / 3.96 / 98.91
LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	23.17	17.42 / 3.98 / 99.53	17.42 / 3.98 / 99.57
LAPAS PEREMPUAN BANDAR LAMPUNG	31.75	17.40 / 3.98 / 99.45	17.44 / 3.99 / 99.67
LAPAS ANAK BANDAR LAMPUNG	30.42	16.85 / 3.85 / 96.26	16.97 / 3.88 / 96.98
RUTAN BANDAR LAMPUNG	51.42	17.46 / 3.99 / 99.77	17.44 / 3.99 / 99.65
RUTAN KOTA AGUNG	31.25	17.46 / 3.99 / 99.78	17.48 / 4.00 / 99.88
RUTAN KOTABUMI	24.83	17.22 / 3.94 / 98.39	17.22 / 3.94 / 98.42
RUTAN KRUI	17.92	16.60 / 3.79 / 94.84	16.65 / 3.81 / 95.13
RUTAN MENGGALA	12.58	17.22 / 3.94 / 98.40	17.23 / 3.94 / 98.45
RUTAN SUKADANA	4.50	16.70 / 3.82 / 95.43	16.60 / 3.79 / 94.86
BAPAS BANDAR LAMPUNG	60.50	17.41 / 3.98 / 99.47	17.42 / 3.98 / 99.52
BAPAS KOTABUMI	30.17	17.48 / 4.00 / 99.90	17.48 / 4.00 / 99.88
BAPAS METRO	13.17	17.02 / 3.89 / 97.24	17.11 / 3.91 / 97.78
BAPAS PRINGSEWU	11.67	16.10 / 3.68 / 91.98	16.11 / 3.68 / 92.07
RUPBASAN BANDAR LAMPUNG	16.00	17.38 / 3.97 / 99.30	17.36 / 3.97 / 99.19
RUPBASAN KOTABUMI	22.58	17.17 / 3.92 / 98.12	17.25 / 3.94 / 98.55
RUPBASAN METRO	0.83	15.06 / 3.44 / 86.04	15.11 / 3.45 / 86.33



A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud Pertanggungjawaban Publik (*Public Accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2020-2024. Secara umum capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 telah tercapai dan bahkan beberapa indikator melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 mencapai 98.79% atau sebesar Rp. 254.076.544.269,- (<http://spanint.kemenkeu.go.id> Tanggal 04 Januari 2024 pukul 15.40 WIB) dari total anggaran sebesar Rp. 257.178.360.000,-. Apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan cukup efisien.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai serta dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung "***Kinerja Kemenkumham Semakin pasti dan Berakhlak***" Tahun 2023. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan K/L terkait, serta instansi terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta stakeholder Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung agar terpenuhinya capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan Surat Edaran Menkumham serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
- b. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Membuat kegiatan capacity building dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh BPSDM ataupun kerjasama dengan pihak eksternal.
- d. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH LAMPUNG 2020-2024



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



2021
REVISI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan turunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan dari pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2014-2019, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan

penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun

2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019, rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Renstra UPT

Perubahan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain terdapat pada perubahan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM beserta Indikator Kinerja Utamanya serta perubahan pada Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Programnya serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

KEPALA KANTOR WILAYAH



DANAN PURNOMO
NIP. 19610513 198203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Surat Kepala Kantor Wilayah Tentang Rencana Strategis 2020-2024.....	1
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lampung	
BAB I	: PENDAHULUAN
A.	Kondisi Umum 4
B.	Potensi permasalahan 14
BAB II	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A.	Visi dan Misi..... 21
B.	Tujuan dan Sasaran Strategis 27
C.	Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM..... 45
D.	Indikator Kinerja Utama 46
BAB III	: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A.	Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM 48
B.	Strategi Kantor WilYh 61
BAB IV	: TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN
A.	Target Kinerja Kantor Wilayah..... 67
B.	Kerangka Pendanaan 68
BAB V	: PENUTUP
	88



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

- MENIMBANG : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan
2. visi, misi, dan tujuan ;
3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan

5. penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2021

 KEPALA KANTOR WILAYAH

DANAN PURNOMO
NIP. 19610513 198203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pemerintahan Negara Republik Indonesia mempunyai rencana pembangunan jangka panjang nasional yang disingkat RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaa Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain, yang dilaksanakan lembaga atau instansi lain, yang sejalan dengan kebijakan Presiden. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategis, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada RPJMN Nasional 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Provinsi Lampung, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah kurun waktu 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai beberapa sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kantor Wilayah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan melalui Survei yang berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :

- Pelayanan Keimigrasian

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Paspor	66.440	62.064	55.312	63.284	59.717
2.	Ijin Tinggal	1.021	896	794	868	932

Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, di antaranya :

- Pengembangan SIMKIM

Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak Bulan Februari 2006. Sedangkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sendiri peralihannya sudah mulai pada 22 April 2019. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja.

- Penambahan Unit Layanan Keimigrasian

Selain 3 Kantor Imigrasi yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan Kantor Imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan, maka Divisi Keimigrasian dengan berpedoman pada aturan Ditjenim membentuk 2 (dua) Unit Kerja Keimigrasian diantaranya Unit Kerja Kantor Imigrasi Klas III Kotabumi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dan Unit Kerja Kantor Imigrasi I Bandar Lampung yang ada di Kabupaten Pringsewu.

- Pelayanan Hukum dan HAM

Capaian pada bidang pelayanan hukum dan HAM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir didukung dari 6 (enam) subbidang pelayanan; Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Pemajuan Hak Asasi Manusia, dan Pengkajian,

Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, diantaranya :

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan Fidusia	90.414	64.020	161.147	245.708	210.973
2.	Pendaftaran Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Indikasi Geografis	0	0	67	77	94
3.	Program Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM	0	0	21	20	21
4.	Yankomas	6	7	8	11	13

Selain itu, berikut adalah kegiatan pelayanan hukum dan HAM periode 2015-2019 yang telah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, diantaranya :

- Telah dilaksanakannya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada 192 orang dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha yang dititikberatkan pada sektor industri, faktor perangkat hukum khususnya perangkat hukum kekayaan intelektual, yang sangat memegang peran penting guna memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT, sejak tahun 2015 hingga saat ini Kanwil Kemenkumham Lampung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang kekayaan intelektual berbasis Teknologi Informasi (TI) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti Permohonan Pendaftaran Hak Cipta secara online (e-Hak Cipta) dan Layanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual secara online (e-filing DJKI). Sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh DJKI bahwa layanan e-filing permohonan Merek, Paten, Desain Industri dan e-Hak Cipta meningkat dengan pesat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara terus menerus melakukan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis penggunaan layanan publik Kekayaan

Intelektual berbasis TI, sehingga fasilitas layanan publik Kekayaan Intelektual berbasis TI dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

- Terlaksananya Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM sebagai upaya dalam mendorong pelaku usaha mendapat Hak Intelektual serta pentingnya pemahaman akan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya perlindungan akan Indikasi Geografis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual bagi Kelompok Pelaku Usaha serta Instansi terkait yang ada di Lampung.
- Telah dilaksanakannya Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota di tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik di Kabupaten Lampung Barat, juga demi meningkatkan kualitas dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk, dengan menjaga kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan norma, baik secara vertikal maupun secara horizontal, terkhusus tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebun Raya Liwa.
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangn Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan menggelar rapat pembahasan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah guna terbentuknya naskah akademik peraturan daerah yang baik.
- Terlaksananya pembinaan terhadap Perancang Perundang-undangan di wilayah dengan pelaksanaan Bimtek Pemantauan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan analisis dan evaluasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terhadap produk hukum daerah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlandaskan serta sesuai dengan variable serta indikator yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kenotariatan dan PPNS, dengan sosialisasi terhadap 150 peserta yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar PPNS yang ada di Provinsi Lampung baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan diharapkan kedepan dapat terhimpun dalam suatu wadah organisasi yang dapat mempersatukan para PPNS yang ada di Provinsi Lampung, sehingga kelembagaan PPNS di Provinsi Lampung akan semakin kuat, sehingga keberadaan PPNS benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal, dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Tahun Anggaran 2019 yang diikuti oleh 50 peserta.
- Melaksanakan tugas teknis penerimaan, inventarisasi, dan pengelolaan terhadap dokumen dan informasi hukum.
- Melaksanakan tugas teknis pelayanan perpustakaan hukum pada Kantor Wilayah.
- Maintenance dan pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah, di tahun 2019 kegiatan asistensi ini diikuti oleh 50 peserta yang bertujuan untuk mempercepat proses integrasi website JDIHN, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola JDIHN, meningkatkan kinerja dan penyebarluasan JDIHN.
- Diselenggarakannya Diseminasi Hak Asasi Manusia, diikuti oleh 95 orang dalam kurun waktu 2017-2019 bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia terkait pelayanan publik berbasis HAM kepada seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menginventarisasi dan identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan mewujudkan kerja sama tim yang solid, dilakukan pembagian tugas berdasarkan bab-bab yang ada dengan saling berkomunikasi, berdiskusi dan berbagi informasi terbaru.
- Melaksanakan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah, dengan mendorong pemerintah daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring pada portal Serambi.
- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung pada tahun 2019 melaksanakan Penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika di 3 Unit Pelaksana Teknis Masyarakat antara lain Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Rutan Kelas I Bandar Lampung sebagai upaya dalam mendukung penegakan hukum pidana khususnya dalam kejahatan narkotik yang bertujuan untuk memetakan narapidana narkotika di seluruh Indonesia dan mencari keterkaitan faktor kriminogen dengan peningkatan jumlah narapidana narkotika.

- Telah terlaksananya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM di wilayah di tahun 2019 dengan kegiatan Sosialisasi Peran dan Layanan Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang diikuti oleh 35 peserta.
- Pelayanan Pemasarakatan
 Pelayanan Pemasarakatan dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

No.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Klien Pemasarakatan Yang Telah Bekerja	768	1.102	1.142	1.187	861
2.	Pengelolaan Basan Baran	25	29	37	83	205
3.	PB, CB, CMB, Remisi	3590	3461	5580	7529	7484
4.	Perawatan Kesehatan	467	813	1.444	1.329	1.854

Selain itu, di periode 2015-2019 dalam mendukung keberhasilan capaian pada layanan pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Divisi Pemasarakatan juga menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemasarakatan Tahun 2019 tentang Assessment Penempatan Dan Program Pembinaan Narapidana Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Lampung yang diikuti 42 petugas Lapas/Rutan, Bapas dan Rupbasan se Propinsi Lampung dengan sasaran yang hendak dicapai adalah dalam rangka terlaksananya program pembinaan narapidana di Lapas secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemasarakatan.
- Menyelenggarakan Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui Aplikasi SMS Gateway dan Layanan Informasi SELF SERVICE.
- Telah terlaksananya Layanan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebanyak 53 data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) melalui percepatan/crash program di tahun 2019.
- Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian, dan Layanan Hukum bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

- Menyelenggarakan Layanan Pengaduan yang direkapitulasi sebanyak 10 data melalui pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, atau pengaduan melalui situs resmi yang telah ditindaklanjuti.

b. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dengan mengacu pada aturan Kementerian, melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Saat ini, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum :

2015	2016	2017	2018	2019
0	30	30	30	30

Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non litigasi dari tahun ke tahun, adalah sebagai berikut :

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bantuan Hukum Litigasi	32	298	120	266	484
2.	Bantuan Hukum Non Litigasi	19	34	26	30	82

2. Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM Yang Menjadi Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata penyelesaian permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM, sebagai berikut :

a. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Keimigrasian

No	Permasalahan Hukum	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tindakan Administrasi	8	1	13	21	14
2.	Pro Justicia	9	0	0	1	2
	Total	17	1	13	22	16

Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum diatas, antara lain :

- Telah dilaksanakannya pembinaan dan pengendalian bidang intelijen dan penindakan keimigrasian pada Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Lampung dengan mengunjungi dan memberikan arahan, serta penguatan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang beranggotakan 20 orang sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Lampung, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melalui operasi gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019.

b. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Pemasarakatan

Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, pada kurun waktu 2015-2019 jumlah kasus pidana terus meningkat hingga mencapai 4.466 kasus. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan pamasarakatan agar angka kasus pidana dapat menurun setiap tahunnya.

c. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pelayanan hukum dan HAM

Capaian perlindungan di bidang pelayanan hukum dan HAM terlihat dari penyelesaian pengaduan dugaan beberapa kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dan layanan yankomas dimana berdasarkan data di tahun 2019 terdapat 13 kasus pengaduan yang sudah ditindaklanjuti.

3. Terimplementasikannya Kebijakan Nasional Yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Indikator dari sasaran ini yaitu jumlah institusi daerah yang melaksanakan program Aksi HAM, serta jumlah kabupaten/kota peduli HAM.

a. Institusi daerah yang melaksanakan program Aksi HAM

Jumlah institusi daerah yang telah melaksanakan program Aksi HAM dari Tahun 2017 sampai 2019 adalah sebanyak 45 institusi daerah.

b. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sebanyak 6 Kabupaten/Kota. Dengan rincian data di Tahun 2017 terdapat 6 Kabupaten/Kota, Tahun 2018 terdapat 5 Kabupaten/Kota, dan di Tahun 2019 terdapat 6 Kabupaten/Kota.

c. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 adalah sejumlah 45 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikut serta mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 1 (satu) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan instansi vertikal dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Lampung. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki 4 (empat) Divisi, diantaranya :

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Pemasarakatan
3. Divisi Keimigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu :

- Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, yang membawahi Subbagian Program dan Pelaporan dan Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
- Bagian Umum, yang membawahi Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

- Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, yang membawahi Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama dan Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, yang membawahi Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi dan Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

- Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Perizinan Keimigrasian dan Subbidang Informasi Keimigrasian

- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Intelijen Keimigrasian dan Subbidang Penindakan Keimigrasian

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu :

- Bidang Pelayanan Hukum, yang membawahi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bidang Hukum, yang membawahi Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- Bidang Hak Asasi Manusia yang membawahi Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung memiliki 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Kabupaten/Kota sewilayah Lampung, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Lembaga Pemasarakatan, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (empat) Balai Pemasarakatan, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi serta 2 (dua) Unit Kerja Keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, diantaranya :

- Divisi Administrasi, dimana telah terbentuknya Tim efektif Akuntabilitas Kinerja serta Ruang Klinik Akuntabilitas yang bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan maupun kesulitan dalam kinerja Kantor Wilayah Lampung dan penyelesaian permasalahan dalam kinerja kantor wilayah, serta terdapatnya inovasi-inovasi dibidang IT, antara lain aplikasi kinerja reformasi birokrasi untuk menghimpun data RB & WBK/WBBM satuan kerja, sistem informasi laporan pengayoman (silap) untuk pembuatan laporan LKIP, borang survey kepuasan masyarakat sesuai permenpan-rb no.14 tahun 2017, sistem informasi survey kepuasan masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang berkunjung memberikan penilaian kepuasan. Serta inovasi dalam bidang pelayanan, diantaranya menyediakan QR code informasi layanan melalui media sosial, website maupun pemasangan di tempat umum sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor wilayah, konsultasi online layanan kewarganegaraan, ahu,ki, notaris melalui contact person selama 24 jam selama masa pandemi covid-19.

- Divisi Pemasyarakatan dengan mengoptimalkan skill Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil sehingga dapat menjadi potensi tenaga kerja produktif Lapas, Kegiatan kerja untuk memberikan kontribusi PNBP, dan Pengembangan keterampilan dengan dukungan dari pihak ketiga.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dimana terbentuknya Law and Human Right Center terkait dalam pembentukan Perda sekaligus layanan hukum terpadu agar akses layanan hukum dan HAM kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik, dan terdapatnya Perpustakaan Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung guna untuk meningkatkan minat baca dan tulis bagi pegawai maupun masyarakat.
- Divisi Keimigrasian, terbentuknya TIMPORA untuk pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah Lampung, dan adanya Unit Kerja Keimigrasian di wilayah kabupaten.

Sejalan dengan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kantor wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan dijabarkan sebagai berikut :

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
DIVISI ADMINISTRASI - Sub Bagian Pengelola Keuangan dan BMN	1. Laporan dari beberapa UPT ke Kanwil tidak tepat waktu yang seharusnya setiap tanggal 10 pada bulan setelah triwulan berakhir sudah diterima oleh Kanwil. 2. Penyampaian hasil rekonsiliasi dari KPPN oleh beberapa UPT ke Kanwil; tidak tepat waktu yang seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
DIVISI ADMINISTRASI - Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga	1. Terdapat surat masuk baik dari pusat maupun dari daerah (prop./Kab./Kota) yang sangat mendadak. Padahal perlu segera dijawab dan ditentukan personelnnya (apabila ada permintaan personel) 2. Apabila ada permintaan data dari pusat dan diteruskan ke para kadiv dan kepala UPT jawabannya sering tidak tepat sesuai waktu yang ditentukan. 3. Kurangnya tenaga/SDM untuk tenaga pengamanan pemasyarakatan dan tenaga medis (dokter dan perawat).
DIVISI ADMINITRASI	1. Sering terlambatnya penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja

<p>- Sub Bagian Program dan pelaporan</p>	<p>serta RKA-KL karena keterlambatan data dukung dari Satker</p> <p>2. Banyaknya revisi anggaran karena kurangnya perencanaan kegiatan di masing-masing bidang/divisi serta perubahan kebijakan dengan perubahan pimpinan.</p>
<p>DIVISI ADMINITRASI</p> <p>-Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi</p>	<p>1. Identifikasi masalah dalam Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Insidentil lainnya kurang optimal karena penyampaian laporan dari Satker seringkali terlambat atau tidak ada.</p> <p>2. Penyampaian data laporan rencana aksi seringkali terhambat karena data yang diberikan Satker tidak sesuai dengan permintaan.</p> <p>3. Tenaga SDM yang ada belum semua mampu melaksanakan tugas kehumasan, keprotokolan, teknologi informasi, penyusunan laporan administrasi dokumentasi kegiatan dengan baik.</p> <p>4. Terdapat kendala dalam akses halaman website.</p> <p>5. Terkait dengan perubahan Orta Kantor Wilayah Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014, dimana terdapat penambahan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi, diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memadai.</p>
<p>DIVISI KEIMIGRASIAN</p>	<p>Kurangnya tenaga SDM di Divisi Imigrasi sedangkan banyak tugas dan fungsi Divisi Imigrasi yang memerlukan tenaga SDM seperti Timpora.</p>
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>	<p>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah belum optimal, hal ini dikarenakan tidak semua Pemerintahan Daerah yang fokus dalam menangani masalah kekayaan intelektual. Sudah ada Pemda yang memiliki nomenklatur tentang KI tapi masih banyak yg belum paham mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.</p>
<p>DIVISI YANKUM - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum berjalan dengan baik dan lancar.</p>
<p>DIVISI YANKUM - Sub Bidang Fasilitas</p>	<p>1. Belum tersosialisasinya ketentuan baru mengenai mekanisme pengharmonisan produk hukum daerah yang diatur dalam</p>

<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya kesamaan perspektif antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kemenkumham terkait dengan mekanisme pengharmonisasian produk hukum daerah. 3. Belum terintegrasinya aturan normatif terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah. 4. Belum adanya kesatuan pemahaman mengenai awal keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. 5. Belum tersosialisasinya urgensi pengharmonisasian pada seluruh produk hukum daerah dan bukan hanya peraturan daerah saja.
<p>DIVISI YANKUM – Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran Informasi dan Norma Hukum yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Hukum di seluruh wilayah pada kabupaten/kota di Propinsi Lampung belum terlaksana secara merata hingga ke pelosok. 2. Belum maksimalnya Keterlibatan Fungsional Penyuluh Hukum dalam Kegiatan Penyebaran Informasi hukum /Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi lainnya. 3. Perpustakaan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Lampung yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan ketidaktahuan masyarakat Lampung akan adanya Perpustakaan Hukum. 4. Kurangnya SDM pegawai yang ahli dalam mengelola Perpustakaan Hukum Online melalui Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil. 5. Masih sedikitnya <i>website</i> anggota JDIHN di Propinsi Lampung yang telah terintegrasi dengan <i>website</i> JDIHN (portal jdihn.go.id).
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM UMUM – Sub Bidang Pemajuan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam hal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 180/1319/SE Tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM terkait dengan Tim

	<p>RANHAM, khususnya untuk provinsi belum sepenuhnya mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan RANHAM tersebut. Sehingga masih ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan rapor merah (Aksi HAM belum sempurna atau masih merah / kuning) dan belum hijau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa adanya rotasi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penghimpunan dan penginputan data Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak maksimal, dan itu mempengaruhi terhadap penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Masih adanya Kabupaten/Kota yang beranggapan bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah Kabupaten/Kota tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal HAM Nomor HAM-HA.01.02-174 Tanggal 12 November 2018 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Pos YANKOMAS), agar dibentuk Pos YANKOMAS di setiap UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian, kini telah terbentuk namun petugas yang diserahkan tugas belum dapat memahami sepenuhnya tentang penanganan YANKOMAS karena belum ada Bimbingan Teknis yang diberikan kepada petugas. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, telah melakukan penilaian terhadap seluruh UPT Pemasarakatan dan Keimigrasi-an di Provinsi Lampung, namun dalam melaksanakan tugas tersebut belum didukung oleh anggaran sehingga Tim Verifikator hanya terdiri dari Tim Internal saja, belum melibatkan tim/pihak luar.
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM - Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa petunjuk teknis yang disampaikan ke Kantor Wilayah tidak sesuai dengan <i>disbursement plan</i> yang telah dibuat Kanwil Kemenkumham Lampung sehingga kegiatan Pengkajian HAM di wilayah tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2. Biaya anggaran kurang memadai untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian sehingga anggaran yang ada harus direvisi. 3. Bahwa dalam mengidentifikasi dan inventarisasi permasalahan

	<p>HAM untuk dimasukkan ke dalam <i>database</i> "Datamaskumham" terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Format kolom yang diisi terlalu banyak dan harus detail sementara kalau data dari media cetak ada yang hanya memuat prakiraan peristiwa tersebut terjadi. b. Data yang ada dalam <i>database</i> "Datamaskumham" tidak tersusun sesuai tanggal, bulan, tahun penginputan sehingga untuk pengisian tarja berupa <i>capture</i> datamaskumham petugas harus membaca lagi dari awal dan kalau data tersebut dicetak akan menggunakan kertas padahal data tersebut sudah dicetak tetapi karena tidak urut maka data yang baru bercampur dengan data yang lama/sudah di laporkan dalam bentuk <i>capture</i>. <p>4. Data atau informasi terkait permasalahan hukum dan HAM yang diinput kedalam Datamaskumham salah satunya bersumber dari surat kabar, namun demikian sampai dengan saat ini belum terdapat penganggaran untuk pembelian surat kabar tersebut.</p>
<p>DIVISI PEMASYARAKATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang mengalami over kapasitas di beberapa UPT. 2. Masih kurangnya tenaga pengamanan pada UPT Pemasyarakatan Kanwil Lampung. 3. Kondisi bangunan beberapa Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang kurang layak. 4. Masih ada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Rupbasan Klas II Metro yang belum memiliki gedung kantor (sewa). 5. Masih minimnya alat-alat pengamanan di Lapas Rutan seperti CCTV, Senjata Api, Borgol, alat deteksi logam.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi

- (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama)
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
 - e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi

kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif

pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*)
- b. membangun kesadaran hokum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expressioan*)
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dan pemasarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya

pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima**, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan **untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan **untuk terlindunginya hak asasi manusia**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan **untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, yang bertujuan **untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan **untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung**

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

SS 9 - Meningkatkan efektivitas organisasi

SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM

Ss 11 – Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .



Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
				perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparat (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab,	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program pembentuk an Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham • Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan • Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

						<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemutakhiran data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan • Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat • Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif • Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung • Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah • Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik

				HAM	publik berbasis HAM • Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	berbasis HAM • Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
--	--	--	--	-----	---	--

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah • Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPW dan MPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah • Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengembangan Layanan Pemasarakan mendukung SPPT-TI (Output PN) • Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakan yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDP Pemasarakan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI • Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakan berbasis TI • Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI • Indeks Efektivitas Kebijakan Pemasarakan

						<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Masyarakatan
					<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead) • Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kendaraan Bermotor • Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran • Jumlah Gedung/Bangunan • Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu • Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan • Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan • Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan

						keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain • Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin • Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar • Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar • Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan • Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang

						<p>Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasaryakatan sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar • Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas • Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal • Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani • Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar • Persentase

						tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai standar (Output PN)	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
					Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian • Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian • Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian • Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

					fungsi keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Internal di Wilayah • Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah • Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia • Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi • Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Pemasaryakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 		<p>Terwujudnya penyelenggaraan Pemasaryakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasaryakatan</p>	<p>Indeks Pelayanan Tahanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Pelayanan Tahanan • Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum • Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum • Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
				<p>Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran • Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) • Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang diselesaikan Persentase pencegahan gangguan kamtib Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di

	masing-masing wilayah			masing wilayah		masing-masing wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi • Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah
--	-----------------------	--	--	----------------	--	--

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan layanan internal di	• Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya	• Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang

kinerja dan pelayanan			di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	manusia <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham 	terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran
					<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham • Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan • Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu • Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat • Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan • Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel • Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar • Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Indeks teknologi informasi dan komunikasi; Tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SMART Nilai IKPA 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SMART Nilai IKPA 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART). Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja

						Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
--	--	--	--	--	--	---

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks efektivitas organisasi 3. Nilai SMART 4. Nilai IKPA
2	Ditjen PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
3	Ditjen AHU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum 2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase menurunnya residivis; 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ditjen Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian

		penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual Peningkatan permohonan kekayaan intelektual Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM	1. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal	1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Indeks maturitas SPIP Opini Audit External atas Laporan Keuangan Indeks Persepsi integritas
9	BPHN	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparat 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas peraturan perundang-undangan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10	Balitbang Hukum dan HAM	1. Meningkatkan efektivitas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Indeks efektifitas organisasi Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Apabila dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

- Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi
- Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun
- Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi
- Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*)
- Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut
- Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
- Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law)
- Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
- Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi
- Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024
- Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN)

b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik
- Pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat

2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
- Membuat kebijakan yang ramah investasi
- Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
 - Pembentukan Kantor Imigrasi baru
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait

- Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*)
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
- 3) Layanan dibidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
- Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis
 - Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :
- Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui kegiatan IP Academy melalui penerapan Corporate University bagi Kanwil dan Workshop KI untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional
 - Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta data based KI
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja

- Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
 - Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan dan otoritas pusat
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
 - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
- Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- Kebijakan Makanan siap saji
 - Perizinan Klinik Pratma di seluruh Lapas dan Rutan

- Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan
 - Penguatan Sistem Data Base Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT
 - Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun)
 - Peningkatan kapasitas operator SDP
 - Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan
 - Pengelolaan kantin di UPT Pemasarakatan secara Profesional dengan Sistem Koperasi
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian
 - Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM
 - Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal)
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI
 - Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK

- Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah
 - Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial
 - Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat
 - Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia
 - Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah
 - Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia
 - Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok
 - Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat
 - Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas
 - Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum
 - Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin
 - Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum

- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventif* dilakukan dengan cara : penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :
- Penguatan sarana prasarana di PLBN
 - Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja
 - Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO
 - Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora
 - Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban

- Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body acaner
 - Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi
 - Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
 - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I
 - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM
 - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan
 - Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM

- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
 - Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah
 - Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya
 - Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan
 - Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian
- 2) Strategi untuk pengawasan intern
- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham

- Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar
- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional
- Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive
- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas
- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham
- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)
- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR)
- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP
- Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai
- Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

3) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

- Melaksanakan *audiency* bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM
- Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks *scopus*
- Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham
- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham
- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham
- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

4) Strategi pengembangan SDM

- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*
- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Proritas Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

B. Strategi Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut susunan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembentukan hukum daerah yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - Mengoptimalkan penguatan fungsi Kantor Wilayah sebagai pusat layanan hukum
 - Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum
 - Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di kantor wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah
 - Peningkatan koordinasi antar *Stakeholders*
 - Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah

2. Mewujudkan layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
 - Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan Merek, Hak Cipta dan Paten untuk usaha kecil dan menengah
 - Penyusunan database identitas notaris wilayah Lampung
 - Meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat
 - Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan cara peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), serta optimalisasi penyebaran nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum

3. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- Perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
 - Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator
4. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
 - Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
 - Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang mendukung pelaksanaan keamanan, pembinaan dan perawatan di LAPAS/RUTAN yang bebas pungutan liar
 - Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil, produktif dan berbudaya
5. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di wilayah Lampung. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian
 - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian

- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI dan non TPI;
 - Mengoptimalkan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam mendukung keamanan negara.
6. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah
 - Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat
 - Mendorong keterlibatan dan peran Kementerian instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM
7. Meningkatkan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum
 - melakukan evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas
 - melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum
 - meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin
 - mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum
8. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban

- Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner
9. Terwujudnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor Wilayah
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Menyusun pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
 - Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - Penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
 - Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
 - Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University
10. Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Pasca Pandemi COVID 19 merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta tetap memberpasca pandemic Covid 19 dengan tetap mempertimbangkan efisiensi

anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Penerapan aturan Work From Home (WFH)
2. Optimalisasi fasilitas SUMAKER dengan strategi memanfaatkan fasilitas proses surat menyurat secara online (SUMAKER)
3. Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM dengan melakukan strategi pembentukan Pos YANKOMAS di UPT sebagai wadah untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas
4. Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan strategi penyesuaian capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 di Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah
5. Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan strategi penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan public berbasis HAM, melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan terhadap petugas, dan memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan
6. Penunjang kesehatan pegawai dengan menyediakan hand sanitizer dan pemberian masker dan vitamin
7. Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan strategi mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference, Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah dengan strategi Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham
9. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana *teleconference* atau *video conference* dengan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum

10. Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi *online* dengan penyedia yang ditunjuk
11. Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dengan melaksanakan strategi Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara *online* dalam kondisi darurat COVID-19
12. Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan strategi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum
13. Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak
14. Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak dengan strategi Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan, dan Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis pada klinik pratama
15. Peningkatan kualitas layanan kunjungan dengan strategi Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan, dan Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan
16. Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

Kepala Kantor Wilayah :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi Corporate University
4. Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)

Kepala Divisi Administrasi :

1. Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi
2. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
3. Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru
4. Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM :

1. Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah
2. Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi
3. Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah
4. Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah
5. Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah
6. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui

sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden

7. Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM
8. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang Cipta Kerja
9. Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum
10. Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi
11. Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah

Kepala Divisi Pemasarakatan :

1. Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan
2. Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan stakeholder
3. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restorative
5. Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan
6. Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/ Bapas Pilot Project

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG					
SS 1		Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 6		Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			1,768,319,000
		- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		264 Orang	
		- Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin		26 Kegiatan	

		- Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		1 kantor wilayah	
		- Jumlah penyuluhan hukum di daerah		2 Kelompok masyarakat	
		- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		1 rekomendasi kebijakan	
		- Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		1 kantor wilayah	
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 2		Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM			41,460,000
		- Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM		60%	
SK 3		Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah			17,765,000
		- Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah		1 buku	
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 7		Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			137,249,000
		- Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi		20 Raperda	
SK 8		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			23,307,000
		- Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		25 Orang	
SS 2		Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat			
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 11		Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah			2,172,010,000
		- Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		75%	
SK 12		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD			841,990,000
		- Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah		100%	

5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Lapas/Rutan/LPKA		452,111,000
SK 12		Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di Wilayah			
		- Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar		100%	
SK 13		Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
		- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		100%	
		- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		100%	
		- Persentase narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		100%	
		- Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi		21,73 %	
SK 14		Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar			
		- Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		60%	
SK 15		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Rupbasan		
		- Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar		100%	
SK 16		Meningkatnya kapasitas hunian	Lapas/Rutan/LPKA/Bapas		
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)		0 UPT	
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		0 UPT	
		- Jumlah UPT pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)		0 UPT	
		- Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan		2 UPT	
SK 17		Terselenggaranya dukungan layanan manajemen Satker	Lapas/Rutan/Lpka/Bapas/Rupbasan		
		- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	
		- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang sesuai standar		1 Layanan	
		- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang		1 Layanan	

		akuntabel dan tepat waktu			
		- Tersedianya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi		1 Layanan	
SS 3		Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat			
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				285,999,000
SK 4		Meningkatnya pelayanan pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Lapas/Rutan/ LPKA		
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar		35%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		85%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		60%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		35%	
SK 5		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Lapas/Rutan/ LPKA/Bapas		
		- Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		100%	
		- Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai standar		100%	
		- Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		100%	
SK 6		Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	LPKA		
		- Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		100%	
		- Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar		75%	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		Lapas/Rutan/ LPKA		
SK 2		Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar			91,434,000
		- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		55%	
		- Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		35%	

		- Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		13,9 %	
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 8		Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah			889.584,841
		- Jumlah kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi keimigrasian		9 kegiatan	
SK 9		Meningkatnya kualitas pelayanan keimigrasian			
		- Persentase penurunan pelanggaran hukum keimigrasian		25%	
SK 10		Meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi			
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan		3 kegiatan	
SK 11		Terselenggaranya layanan manajemen Satker			
		- Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan Satker		90%	
SK 12		Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana internal			754,382,000
		- Jumlah layanan internal overhead		1 layanan	
SK 13		Terselenggaranya layanan perkantoran			5,309,782,260
		- Jumlah layanan perkantoran		1 layanan	
SK 14		Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker			1,301,325,298
		- Jumlah layanan dukungan manajemen satker		1 layanan	
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Imigrasi		1,157,401,000
SK 3		Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian			
		- Persentase penurunan pelanggaran hukum keimigrasian		30%	
SK 4		Meningkatnya pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah pengawasan keimigrasian		1 kegiatan	
SK 5		Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah pengawasan keimigrasian		1 kegiatan	
SK 6		Meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang sesuai ketentuan	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah tindakan administratif keimigrasian		1 kegiatan	

SS 4		Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM			
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 9		Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			98,410,000
		- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		6 Instansi Pemerintah	
		- Jumlah kabupaten/kota peduli HAM		15 Kab/Kota	
		- Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		1 Instansi Pemerintah	
SK 10		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah			89.463.000
		- Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah		7 rekomendasi	
TOTAL					14,452,944,558

Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				ALOKASI			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SS 1		Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan									
5250	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8a		Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah						155,423,000	163,194,150	171,353,857	179,921,549
		- Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		20 raperda	20 raperda	20 raperda	20 raperda				
SK 8b		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan						52,577,000	55,205,850	57,966,142	60,864,449
		- Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		25 orang	25 orang	25 orang	25 orang				
5256	Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah		Kantor Wilayah								

SK 6		Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah						96,733,000	101,569,650	106,648,132	111,980,538
		- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan				
5255	Penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8		Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM						113,640,000	119,322,000	125,288,100	131,552,505
		- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah				
		- Jumlah Kab/Kota peduli HAM		15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota				
		- Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah				
SK 11		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah						117,933,300	123,829,965	130,021,463	136,522,536
		- Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah		3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi				

5251	Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 10		Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum						1,845,463,000	1,974,645,410	2,073,377,680	2,177,046,564
		- Persentase peningkatan PNBPN administrasi hukum umum di wilayah		85%	85%	85%	85%				
SK 11		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD						1,084,456,000	1,138,678,800	1,195,612,740	1,255,393,377
		- Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah		100%	100%	100%	100%				
5252	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA					98,860,000	103,803,000	108,993,150	114,442,807
SK 14		Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah									

				100%	100%	100%	100%				
		- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)		100%	100%	100%	100%				

				25%	25%	30%	35%				
		- Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba									
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 12		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						770,345,000	808,862,250	849,305,362	891,770,630
		- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,05	3,10	3,15				
		- Indeks kepuasan internal di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
		- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
5253	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah		Kantor Wilayah								
Sk 8		Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kemenkumham						1,036,949,000	1,088,796,450	1,143,236,272	1,200,398,085

		- Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		77	84	92	100				
		- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		33 stakeholder	36 stakeholder	39 stakeholder	42 stakeholder				
SK 9		Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kemenkumham yang handal						123,653,000	129,835,650	136,345,432	143,162,703
		- Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual		100%	100%	100%	100%				
		- Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		3 lokus	5 lokus	5 lokus	5 lokus				
5252	Penyelenggaraan masyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan					327,834,000	344,225,700	361,436,985	379,508,834
SK 13		Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah									
		- Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah		3,10	3,15	3,20	3,25				
SK 15		Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar									
		- Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		10%	15%	15%	20%				

				50%	50%	50%	50%				
		- Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum									
				100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum									
SK 16		Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi									
				51%	50%	50%	50%				
		- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian									
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		60%	61%	62%	63%				
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		80%	85%	90%	95%				
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		20%	25%	30%	30%				
				2%	2%	2,5%	2,5%				
		- Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin									
		- Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		55%	55%	60%	60%				
		- Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		55%	55%	60%	60%				
		- Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi									
SK 17		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar									

		- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	20%	25%	30%	30%				
		- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	55%	55%	55%	60%				
SK 19		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar								
		- Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	37%	38%	40%	42%				
		- Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	10%	10%	15%	15%				
		- Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50%	50%	55%	55%				
SK 20		Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar								
		- Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	25%	25%	30%	35%				
		- Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	20%	25%	25%	30%				
		- Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	5%	10%	10%	15%				

5252	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA								
SK 18		Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar						173,950,000	182,647,500	191,779,875	201,368,868
		- Persentase pengaduan yang ditidaklanjuti sesuai standar		55%	56%	57%	57%				
		- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		37%	38%	40%	45%				
		- Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib		51%	50%	50%	50%				
		- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		20%	20%	25%	30%				
4841	Penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah										
SK 7		Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah						1,894,374,000	1,989,092,700	2,088,547,335	2,192,974,701

				164 orang	208 orang	208 orang	209 orang				
		- Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
		- Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		18 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan	25 kegiatan				
		- Indeks kepuasan layanan bantuan hokum		7,5	7,5	7,5	7,5				
5249	Penyelenggaraan diklat aparatur di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 6		Terselenggaranya pelatihan di wilayah									
		- Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah		75%	80%	85%	90%				
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kementerian dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI									
		- Persentase satker yang nilai AKIP minimal "BB"		90%	91%	92%	93%				
		- Persentase satker yang nilai capaian RB minimal 90		90%	91%	92%	93%				
		- Persentase satker yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		3%	3%	3,5%	3,5%				

		- Indeks persepsi integritas kemenkumham		65,0	66,0	67,0	68,0				
1558	Pengelolaan administratif dan fasilitatif kanwil kemenkumham		Kantor Wilayah								
SK 7		Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kanwil yang efektif dan efisien						754,382,000	792,101,100	831,706,155	873,291,462
		- Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kanwil		3,5	3,10	3,15	3,20				
6231	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT masyarakatan										
SK 13a		Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker						15,748,665,000	16,536,098,250	17,362,903,162	18,231,048,320
		- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
		- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
		- Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan		80%	85%	90%	95%				

		- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		- Jumlah layanan perkantoran									
		- Jumlah kendaraan bermotor		154 unit	168 unit	182 unit	196 unit				
		- Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi		2142 unit	2337 unit	2532 unit	2727 unit				
		- Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		11332 unit	12362 unit	13962 unit	14422 unit				
		- Jumlah gedung / bangunan		631 unit	688 unit	745 unit	802 unit				
		Meningkatnya kualitas layanan masyarakat dan kapasitas hunian									
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)		0	1	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)		0	0	0	0				
		- Jumlah pembangunan/rehabilitasi/renovasi lembaga masyarakat narkotika		0	0	0	0				

		- Jumlah UPT rehabilitasi/renovasi Lapas/Ritan/Bapas/LPKA/Rupbasan		1	1	1	1				
6232	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT imigrasi		Kantor Imigrasi								
SK 15		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						770,345,000	808,862,250	849,305,362	891,770,630
		- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,05	3,10	3,15				
		- Indeks kepuasan internal di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
		- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
5248	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8		Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengembangan hukum dan HAM						200,621,000	210,652,050	221,184,652	232,243,884

				85%	85%	85%	85%				
		- Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM									
		- Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah		1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan				
TOTAL KEBUTUHAN KEMENKUMHAM								25,366,203,3 00	26,671,422,7 25	28,005,011,8 56	29,405,262, 442

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah untuk merespon terhadap berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung ini bersifat terbuka untuk penyempurnaan atau penyesuaian dari kemungkinan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Melalui penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.



Kepala Kantor Wilayah,

Danan Purnomo

NIP. 196105131982031001



E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

REKAP PENILAIAN MANDIRI AKIP 2024

UKE 1

NO	UNIT	NILAI
1	SEKRETARIAT JENDERAL	72.25
2	INSPEKTORAT JENDRAL	74.05
3	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	belum dinilai
4	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	20
5	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	belum dinilai
6	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	belum dinilai
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	belum dinilai
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	belum dinilai
9	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	belum dinilai
10	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	belum dinilai
11	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	20

KANTOR WILAYAH

NO	UNIT	NILAI
1	KANTOR WILAYAH ACEH	87.5
2	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA	86.9
3	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT	87.5
4	KANTOR WILAYAH RIAU	87.5
5	KANTOR WILAYAH JAMBI	87.5
6	KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG	87.5
7	KANTOR WILAYAH BENGKULU	87.5
8	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	87.5
9	KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA	87.5
10	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT	86
11	KANTOR WILAYAH BANTEN	86
12	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH	87.5
13	KANTOR WILAYAH D.I YOGYAKARTA	95
14	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR	87.5
15	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT	87.5
16	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	87.5
17	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	87.5
18	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	87.5
19	KANTOR WILAYAH BALI	87.5
20	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	87.5
21	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	87.5
22	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN	87.5
23	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH	87.5
24	KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA	86
25	KANTOR WILAYAH GORONTALO	87.5
26	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA	84.5
27	KANTOR WILAYAH MALUKU	87.5
28	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	87.5
29	KANTOR WILAYAH PAPUA	87.5
30	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT	87.5
31	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU	87.5
32	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT	83.3
33	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN	87.5

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA			TARGET
				PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%	
				(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (b) : (a)	(d)	(e)	(d) - (e)	(f) = (e) : (d)	(g)	(h)	(g) - (h)	(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)	
1			DIVISI ADMINISTRASI																
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%	22,723,570,000	22,113,640,636	97.32%	98.00
			SUB TOTAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%	22,723,570,000	22,113,640,636	97.32%	
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM																
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM			0	0.00%	3,416,092,000	3,326,040,939	90,051,061	97.36%			0	0.00%	3,416,092,000	3,326,040,939	97.36%	98.00
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL			0	0.00%	1,535,857,000	1,531,909,870	3,947,130	99.74%			0	0.00%	1,535,857,000	1,531,909,870	99.74%	98.00
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			0	0.00%	232,000,000	213,141,835	18,858,165	91.87%			0	0.00%	232,000,000	213,141,835	91.87%	98.00
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA			0	0.00%	233,073,000	227,966,164	5,106,836	97.81%			0	0.00%	233,073,000	227,966,164	97.81%	98.00
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			0	0.00%	1,772,677,000	1,750,885,111	21,791,889	98.77%	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	1,777,677,000	1,755,885,111	98.77%	98.00
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			0	0.00%	200,621,000	197,339,609	3,281,391	98.36%			0	0.00%	200,621,000	197,339,609	98.36%	98.00
			SUB TOTAL	0	0	0	0.00%	7,390,320,000	7,247,283,528	143,036,472	98.06%	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	7,395,320,000	7,252,283,528	98.07%	
3			DIVISI PEMASYARAKATAN																
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN			0	0.00%	664,356,000	645,679,424	18,676,576	97.19%			0	0.00%	664,356,000	645,679,424	97.19%	98.00
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	10,726,488,000	10,708,535,630	17,952,370	99.83%	11,359,294,000	11,205,182,719	154,111,281	98.64%			0	0.00%	22,085,782,000	21,913,718,349	99.22%	98.00
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8,728,831,000	8,639,363,281	89,467,719	98.98%	9,119,258,000	8,855,062,365	264,195,635	97.10%			0	0.00%	17,848,089,000	17,494,425,646	98.02%	98.00
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5,453,171,000	5,401,377,666	51,793,334	99.05%	3,100,822,000	3,057,339,823	43,482,177	98.60%			0	0.00%	8,553,993,000	8,458,717,489	98.89%	98.00
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	6,237,873,000	6,227,401,993	10,471,007	99.83%	6,135,845,000	6,070,821,760	65,023,240	98.94%			0	0.00%	12,373,718,000	12,298,223,753	99.39%	98.00
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	4,750,056,000	4,740,083,654	9,972,346	99.79%	7,428,087,000	7,366,410,012	61,676,988	99.17%	1,548,699,000	1,514,972,212	33,726,788	97.82%	13,726,842,000	13,621,465,878	99.23%	98.00
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3,572,678,000	3,504,754,019	67,923,981	98.10%	3,982,432,000	3,963,182,759	19,249,241	99.52%			0	0.00%	7,555,110,000	7,467,936,778	98.85%	98.00
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3,950,441,000	3,941,393,355	9,047,645	99.77%	5,324,753,000	5,315,522,866	9,230,134	99.83%			0	0.00%	9,275,194,000	9,256,916,221	99.80%	98.00
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3,324,933,000	3,298,441,083	26,491,917	99.20%	5,244,182,000	5,190,649,581	53,532,419	98.98%			0	0.00%	8,569,115,000	8,489,090,664	99.07%	98.00
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	4,022,825,000	4,006,499,677	16,325,323	99.59%	6,383,976,000	6,366,164,522	17,811,478	99.72%	200,198,000	199,947,000	251,000	99.87%	10,606,999,000	10,572,611,199	99.68%	98.00
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4,156,814,000	4,097,218,284	59,595,716	98.57%	3,071,880,000	3,054,144,757	17,735,243	99.42%			0	0.00%	7,228,694,000	7,151,363,041	98.93%	98.00
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7,875,683,000	7,793,676,708	82,006,292	98.96%	10,218,771,000	10,087,149,300	131,621,700	98.71%			0	0.00%	18,094,454,000	17,880,826,008	98.82%	98.00
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3,476,030,000	3,452,549,041	23,480,959	99.32%	4,346,028,000	4,339,168,941	6,859,059	99.84%	2,363,507,000	2,355,764,248	7,742,752	99.67%	10,185,565,000	10,147,482,230	99.63%	98.00
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3,350,280,000	3,345,830,032	4,449,968	99.87%	4,759,003,000	4,758,772,763	230,237	100.00%			0	0.00%	8,109,283,000	8,104,602,795	99.94%	98.00
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3,123,156,000	3,096,993,100	26,162,900	99.16%	2,176,159,000	2,116,493,325	59,665,675	97.26%			0	0.00%	5,299,315,000	5,213,486,425	98.38%	98.00
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3,459,201,000	3,458,943,991	257,009	99.99%	3,478,448,000	3,400,347,801	78,100,199	97.75%			0	0.00%	6,937,649,000	6,859,291,792	98.87%	98.00
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2,750,776,000	2,697,677,753	53,098,247	98.07%	3,203,006,000	3,183,494,176	19,511,824	99.39%			0	0.00%	5,953,782,000	5,881,171,929	98.78%	98.00
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4,704,947,000	4,690,260,698	14,686,302	99.69%	1,096,136,000	1,086,684,915	9,451,085	99.14%			0	0.00%	5,801,083,000	5,776,945,613	99.58%	98.00
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3,654,914,000	3,561,069,702	93,844,298	97.43%	821,296,000	800,489,000	20,807,000	97.47%	5,367,000,000	5,360,840,920	6,159,080	99.89%	9,843,210,000	9,722,399,622	98.77%	98.00
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	1,079,637,000	1,063,246,086	16,390,914	98.48%	1,034,824,000	1,023,546,601	11,277,399	98.91%			0	0.00%	2,114,461,000	2,086,792,687	98.69%	98.00
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	1,711,024,000	1,699,794,907	11,229,093	99.34%	997,695,000	967,716,046	29,978,954	97.00%	377,650,000	373,338,800	4,311,200	98.86%	3,086,369,000	3,040,849,753	98.53%	98.00
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2,057,607,000	1,992,038,904	65,568,096	96.81%	667,223,000	596,957,911	70,265,089	89.47%			0	0.00%	2,724,830,000	2,588,996,815	95.01%	98.00
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1,472,322,000	1,457,147,969	15,174,031	98.97%	540,403,000	435,456,500	104,946,500	80.58%	0		0	0.00%	2,012,725,000	1,892,604,469	94.03%	98.00
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	1,055,457,000	1,027,361,848	28,095,152	97.34%	595,055,000	575,991,000	19,064,000	96.80%	0		0	0.00%	1,650,512,000	1,603,352,848	97.14%	98.00
			SUB TOTAL	94,695,144,000	93,901,659,381	793,484,619	99.16%	95,748,932,000	94,462,428,867	1,286,503,133	98.66%	9,857,054,000	9,804,863,180	52,190,820	99.47%	200,301,130,000	198,168,951,428	98.94%	
4			DIVISI KEIMIGRASIAN																
	06	408825	DITJEN IMIGRASI			0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	15,727,251	98.94%			0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	98.94%	98.00
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4,520,828,000	4,514,318,673	6,509,327	99.86%	6,372,633,000	6,371,116,207	1,516,793	99.98%	814,999,000	813,729,000	1,270,000	99.84%	11,708,460,000	11,699,163,880	99.92%	98.00
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1,171,901,000	1,166,198,402	5,702,598	99.51%	3,035,440,000	2,892,565,472	142,874,528	95.29%	276,436,000	273,172,590	3,263,410	98.82%	4,483,777,000	4,331,936,464	96.61%	98.00
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1,553,707,000	1,540,218,679	13,488,321	99.13%	3,171,024,000	3,160,308,056	10,715,944	99.66%	4,358,751,000	4,343,147,849	15,603,151	99.64%	9,083,482,000	9,043,674,584	99.56%	98.00
			SUB TOTAL	7,246,436,000	7,220,735,754	25,700,246	99.65%	14,061,718,000	13,890,883,484	170,834,516	98.79%	5,450,186,000	5,430,049,439	20,136,561	99.63%	26,758,340,000	26,541,668,677	99.19%	
			TOTAL KESELURUHAN	115,870,601,000	114,664,026,432	1,206,574,568	98.96%	125,213,388,000	123,396,939,968	1,816,448,032	98.55%	16,094,371,000	16,015,577,869	78,793,131	99.51%	257,178,360,000	254,076,544,269	98.79%	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
DIPA KANTOR WILAYAH

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA		
				PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%
				(a)	(b)		(c) = (b) : (a)	(d)	(e)		(f) = (e) : (d)	(g)	(h)		(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1			DIVISI ADMINISTRASI															
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%	22,723,570,000	22,113,640,636	97.32%
			SUB TOTAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%	22,723,570,000	22,113,640,636	97.32%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM															
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	-	0	0	0.00%	3,416,092,000	3,326,040,939	90,051,061	97.36%	0	0	0	0.00%	3,416,092,000	3,326,040,939	97.36%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	0	0	0.00%	1,535,857,000	1,531,909,870	3,947,130	99.74%	0	0	0	0.00%	1,535,857,000	1,531,909,870	99.74%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	0	0	0.00%	232,000,000	213,141,835	18,858,165	91.87%	0	0	0	0.00%	232,000,000	213,141,835	91.87%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	-	0	0	0.00%	233,073,000	227,966,164	5,106,836	97.81%	0	0	0	0.00%	233,073,000	227,966,164	97.81%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	-	0	0	0.00%	1,772,677,000	1,750,885,111	21,791,889	98.77%	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	1,777,677,000	1,755,885,111	98.77%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	-	0	0	0.00%	200,621,000	197,339,609	3,281,391	98.36%	0	0	0	0.00%	200,621,000	197,339,609	98.36%
			SUB TOTAL	0	0	0	0.00%	7,390,320,000	7,247,283,528	143,036,472	98.06%	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	7,395,320,000	7,252,283,528	98.07%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN															
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	-	0	0	0.00%	664,356,000	645,679,424	18,676,576	97.19%	0	0	0	0.00%	664,356,000	645,679,424	97.19%
			SUB TOTAL (05)	0	0	0	0.00%	664,356,000	645,679,424	18,676,576	97.19%	0	0	0	0.00%	664,356,000	645,679,424	97.19%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN															
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	-	0	0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	15,727,251	98.94%	0	0	0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	98.94%
			SUB TOTAL (06)	0	0	0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	15,727,251	98.94%	0	0	0	0.00%	1,482,621,000	1,466,893,749	98.94%
			TOTAL KESELURUHAN	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%	17,549,715,000	17,156,200,790	393,514,210	97.76%	787,131,000	780,665,250	6,465,750	99.18%	32,265,867,000	31,478,497,337	97.56%

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (b) : (a)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%
			SUB TOTAL	13,929,021,000	13,541,631,297	387,389,703	97.22%
2			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	10,726,488,000	10,708,535,630	17,952,370	99.83%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8,728,831,000	8,639,363,281	89,467,719	98.98%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5,453,171,000	5,401,377,666	51,793,334	99.05%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	6,237,873,000	6,227,401,993	10,471,007	99.83%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	4,750,056,000	4,740,083,654	9,972,346	99.79%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3,572,678,000	3,504,754,019	67,923,981	98.10%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3,950,441,000	3,941,393,355	9,047,645	99.77%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3,324,933,000	3,298,441,083	26,491,917	99.20%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	4,022,825,000	4,006,499,677	16,325,323	99.59%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4,156,814,000	4,097,218,284	59,595,716	98.57%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7,875,683,000	7,793,676,708	82,006,292	98.96%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3,476,030,000	3,452,549,041	23,480,959	99.32%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3,350,280,000	3,345,830,032	4,449,968	99.87%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3,123,156,000	3,096,993,100	26,162,900	99.16%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3,459,201,000	3,458,943,991	257,009	99.99%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2,750,776,000	2,697,677,753	53,098,247	98.07%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4,704,947,000	4,690,260,698	14,686,302	99.69%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3,654,914,000	3,561,069,702	93,844,298	97.43%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	1,079,637,000	1,063,246,086	16,390,914	98.48%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	1,711,024,000	1,699,794,907	11,229,093	99.34%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2,057,607,000	1,992,038,904	65,568,096	96.81%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1,472,322,000	1,457,147,969	15,174,031	98.97%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	1,055,457,000	1,027,361,848	28,095,152	97.34%
			SUB TOTAL	94,695,144,000	93,901,659,381	793,484,619	99.16%
3			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4,520,828,000	4,514,318,673	6,509,327	99.86%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1,171,901,000	1,166,198,402	5,702,598	99.51%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1,553,707,000	1,540,218,679	13,488,321	99.13%
			SUB TOTAL (06)	7,246,436,000	7,220,735,754	25,700,246	99.65%
			TOTAL KESELURUHAN	115,870,601,000	114,664,026,432	1,206,574,568	98.96%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

04 Januari 2024 pukul 15.46 WIB

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA BARANG			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(d)	(e)	(d) - (e)	(f) = (e) : (d)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%
			SUB TOTAL	8,012,418,000	7,796,344,089	216,073,911	97.30%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM				
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3,416,092,000	3,326,040,939	90,051,061	97.36%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,535,857,000	1,531,909,870	3,947,130	99.74%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	232,000,000	213,141,835	18,858,165	91.87%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	233,073,000	227,966,164	5,106,836	97.81%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1,772,677,000	1,750,885,111	21,791,889	98.77%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	200,621,000	197,339,609	3,281,391	98.36%
			SUB TOTAL	7,390,320,000	7,247,283,528	143,036,472	98.06%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	664,356,000	645,679,424	18,676,576	97.19%
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	11,359,294,000	11,205,182,719	154,111,281	98.64%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	9,119,258,000	8,855,062,365	264,195,635	97.10%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	3,100,822,000	3,057,339,823	43,482,177	98.60%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	6,135,845,000	6,070,821,760	65,023,240	98.94%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	7,428,087,000	7,366,410,012	61,676,988	99.17%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3,982,432,000	3,963,182,759	19,249,241	99.52%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	5,324,753,000	5,315,522,866	9,230,134	99.83%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	5,244,182,000	5,190,649,581	53,532,419	98.98%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	6,383,976,000	6,366,164,522	17,811,478	99.72%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	3,071,880,000	3,054,144,757	17,735,243	99.42%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	10,218,771,000	10,087,149,300	131,621,700	98.71%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	4,346,028,000	4,339,168,941	6,859,059	99.84%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	4,759,003,000	4,758,772,763	230,237	100.00%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	2,176,159,000	2,116,493,325	59,665,675	97.26%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3,478,448,000	3,400,347,801	78,100,199	97.75%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	3,203,006,000	3,183,494,176	19,511,824	99.39%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	1,096,136,000	1,086,684,915	9,451,085	99.14%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	821,296,000	800,489,000	20,807,000	97.47%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	1,034,824,000	1,023,546,601	11,277,399	98.91%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	997,695,000	967,716,046	29,978,954	97.00%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	667,223,000	596,957,911	70,265,089	89.47%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	540,403,000	435,456,500	104,946,500	80.58%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	595,055,000	575,991,000	19,064,000	96.80%
			SUB TOTAL	95,748,932,000	94,462,428,867	1,286,503,133	98.66%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	1,482,621,000	1,466,893,749	15,727,251	98.94%
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	6,372,633,000	6,371,116,207	1,516,793	99.98%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	3,035,440,000	2,892,565,472	142,874,528	95.29%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	3,171,024,000	3,160,308,056	10,715,944	99.66%
			SUB TOTAL (06)	14,061,718,000	13,890,883,484	170,834,516	98.79%
			TOTAL KESELURUHAN	125,213,388,000	123,396,939,968	1,816,448,032	98.55%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

04 Januari 2024 pukul 15.46 WIB

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA MODAL			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(g)	(h)	(g) - (h)	(i) = (h) : (g)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%
			SUB TOTAL	782,131,000	775,665,250	6,465,750	99.17%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM				
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	0	0	0	0.00%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0	0	0.00%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0.00%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0.00%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0.00%
			SUB TOTAL	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	0	0	0	0.00%
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	0	0	0	0.00%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	1,548,699,000	1,514,972,212	33,726,788	97.82%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	0	0	0	0.00%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	0	0	0	0.00%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	0	0	0	0.00%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	200,198,000	199,947,000	251,000	99.87%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	2,363,507,000	2,355,764,248	7,742,752	99.67%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	0	0	0	0.00%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	0	0	0	0.00%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	0	0	0	0.00%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	0	0	0	0.00%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	5,367,000,000	5,360,840,920	6,159,080	99.89%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	0	0	0	0.00%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	377,650,000	373,338,800	4,311,200	98.86%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	0	0	0	0.00%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	0	0	0	0.00%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	0	0	0	0.00%
			SUB TOTAL (05)	9,857,054,000	9,804,863,180	52,190,820	0.00%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	0	0	0	0.00%
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	814,999,000	813,729,000	1,270,000	99.84%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	276,436,000	273,172,590	3,263,410	98.82%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	4,358,751,000	4,343,147,849	15,603,151	99.64%
			SUB TOTAL (06)	5,450,186,000	5,430,049,439	20,136,561	99.63%
			TOTAL KESELURUHAN	16,094,371,000	16,015,577,869	78,793,131	99.51%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

04 Januari 2024 pukul 15.46 WIB

REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI	% TARGET	% DEVIASI
1	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3,416,092,000	3,326,040,939	90,051,061	97.36	98.00	9.43
2	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	8,109,283,000	8,104,602,795	4,680,205	99.94	98.00	1.94
3	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	11,708,460,000	11,699,163,880	9,296,120	99.92	98.00	1.92
4	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	9,275,194,000	9,256,916,221	18,277,779	99.80	98.00	1.80
5	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,535,857,000	1,531,909,870	3,947,130	99.74	98.00	1.74
6	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	10,606,999,000	10,572,611,199	34,387,801	99.68	98.00	1.68
7	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	10,185,565,000	10,147,482,230	38,082,770	99.63	98.00	1.63
8	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	5,801,083,000	5,776,945,613	24,137,387	99.58	98.00	1.58
9	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	9,083,482,000	9,043,674,584	39,807,416	99.56	98.00	1.56
10	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	12,373,718,000	12,298,223,753	75,494,247	99.39	98.00	1.39
11	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	13,726,842,000	13,621,465,878	105,376,122	99.23	98.00	1.23
12	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	22,085,782,000	21,913,718,349	172,063,651	99.22	98.00	1.22
13	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	8,569,115,000	8,489,090,664	80,024,336	99.07	98.00	1.07
14	408825	DITJEN IMIGRASI	1,482,621,000	1,466,893,749	15,727,251	98.94	98.00	0.94
15	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	7,228,694,000	7,151,363,041	77,330,959	98.93	98.00	0.93
16	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	8,553,993,000	8,458,717,489	95,275,511	98.89	98.00	0.89
17	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	6,937,649,000	6,859,291,792	78,357,208	98.87	98.00	0.87
18	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	7,555,110,000	7,467,936,778	87,173,222	98.85	98.00	0.85
19	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	18,094,454,000	17,880,826,008	213,627,992	98.82	98.00	0.82
20	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	5,953,782,000	5,881,171,929	72,610,071	98.78	98.00	0.78
21	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1,777,677,000	1,755,885,111	21,791,889	98.77	98.00	0.77
22	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	9,843,210,000	9,722,399,622	120,810,378	98.77	98.00	0.77
23	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	2,114,461,000	2,086,792,687	27,668,313	98.69	98.00	0.69
24	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	3,086,369,000	3,040,849,753	45,519,247	98.53	98.00	0.53
25	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	5,299,315,000	5,213,486,425	85,828,575	98.38	98.00	0.38
26	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HA	200,621,000	197,339,609	3,281,391	98.36	98.00	0.36
27	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	17,848,089,000	17,494,425,646	353,663,354	98.02	98.00	0.02
28	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	233,073,000	227,966,164	5,106,836	97.81	98.00	-0.19
29	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	22,723,570,000	22,113,640,636	609,929,364	97.32	98.00	-0.68
30	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	664,356,000	645,679,424	18,676,576	97.19	98.00	-0.81
31	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	1,650,512,000	1,603,352,848	47,159,152	97.14	98.00	-0.86
32	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	4,483,777,000	4,331,936,464	151,840,536	96.61	98.00	-1.39
33	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2,724,830,000	2,588,996,815	135,833,185	95.01	98.00	-2.99
34	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	2,012,725,000	1,892,604,469	120,120,531	94.03	98.00	-3.97
35	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	232,000,000	213,141,835	18,858,165	91.87	98.00	-6.13
TOTAL KESELURUHAN REALISASI KANWIL			257,178,360,000	254,076,544,269	3,101,815,731	98.79	98.00	0.79

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

04 Januari 2024 pukul 15.46 WIB

REALISASI
TARGET DISBURSEMENT PLAN
DEVIASI (+ / -)

98.79%
98.00%
0.79%



LAPORAN
INPUT DATA APLIKASI E-PERFORMANCE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG BESERTA JAJARAN
B12 - TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Input Data Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban yang akuntabilitas dalam Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Laporan ini merupakan laporan rutin yang dilaksanakan berkala dari B01 *sampai dengan* B12 guna menguatkan komitmen kerja Semakin PASTI, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif serta meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Laporan Input Data Aplikasi E-Performance ini disajikan untuk memberikan gambaran terhadap akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu. Yang kemudian Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dari satuan unit kerja sampai dengan Presiden dilakukan melalui mekanisme berjenjang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung terus mendorong seluruh jajaran dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berintegritas.

B. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- G. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ;
- H. Kementerian Hukum dan HAM;
- I. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Laporan *Input Data* Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran Tahun Anggaran 2023 adalah untuk berkomitmen :

1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja, serta *Action Plan* Target Kinerja secara tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Mengembangkan diri menjadi aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tangguh, terampil, dinamis dan adaptif melalui implementasi *Corporate University*;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan *Good Governance*;

II. LAPORAN

A. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan *Input Data* Aplikasi E-Performance hanya berada diruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran **periode B12 Tahun Anggaran 2023**.

B. Hasil

Adapun hasil Laporan *Input Data* Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran periode TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2023 adalah telah tersusunnya *input* pada aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi di Wilayah Lampung **Tidak dapat dilakukan input aplikasi E-Performance** periode B12 Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Aplikasi E-Performance masih dalam tahap **Maintenance Website Pasca Development** dan jaringan yang digunakan menggunakan jaringan internet terpadu hanya dapat di akses melalui jaringan internet **Pusdatin** yang hanya tersedia di Kantor wilayah sesuai informasi yang telah disampaikan oleh PAP Biro Perencanaan dan Pusdatin Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

III. Penutup

Demikian Laporan *Input Data* Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran periode B12 Tahun Anggaran 2023. Kami akan terus berkarya, menjunjung tinggi kejujuran untuk membangun Kementerian Hukum dan HAM yang berwibawa, berkarya yang nyata demi kejayaan bangsa khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung dengan semboyan "**LAMPUNG SAI!!! PASTI KECE!!!** (*Kerja Cerdas, Kerja Cepat dan Kerja Cermat*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung SIAP menuju **KEMENKUMHAM SEMAKIN PASTI dan BERAKHLAK**".



Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ikmal Irdrus

NIP. 19690318 200312 1 002





E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	BOBOT	SCORE(%)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang terintegrasi, efektif dan efisien	1	Nilai Reformasi Birokrasi + -	1. DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG	1. DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG	87 Nilai: Triwulan IV	TW1	75	Nilai	75	100	Januari: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-03 E-RB (Maret) Februari: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-03 E-RB (Maret) Maret: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-03 E-RB (Maret)		0	0
							TW2	80	Nilai	80	100	April: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-06 E-RB (Juni) Mei: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-06 E-RB (Juni) Juni: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-06 E-RB (Juni)			
							TW3	85	Nilai	85	100	Juli: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-09 E-RB (September) Agustus: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-09 E-RB (September) September: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-09 E-RB (September)			
							TW4	87	Nilai	87	100	Oktober: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-12 E-RB (Desember) November: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-12 E-RB (Desember) Desember: Nilai Reformasi Birokrasi akan diperoleh melalui aplikasi E-RB pada B-12 E-RB (Desember)			
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja + -	1. DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG	1. DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG	92 Nilai: Triwulan IV	TW1	75	Nilai	75	100	Januari: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas Februari: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas Maret: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas April: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas		0	0
							TW2	80	Nilai	80	100	Mei: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas Juni: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas			
							TW3	85	Nilai	85	100	Juli: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas Agustus: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas September: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas			
							TW4	92	Nilai	92	100	Oktober: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas November: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas Desember: Akuntabilitas Kinerja kanwil Lampung terlaksana dan dilaporkan melalui Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas			
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	2	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" + -			94 Persen: Triwulan III	TW1	75	Persen	75	100	Januari: Nilai AKIP Februari: Nilai AKIP Maret: Nilai AKIP		0	0
							TW2	85	Persen	85	100	April: Nilai AKIP Mei: Nilai AKIP Juni: Nilai AKIP			
							TW3	94	Persen	121.5	129	Juli: Nilai AKIP Agustus: Nilai AKIP Kanwil Lampung Tahun 2022 adalah 87.5. Berdasarkan Aplikasi E-Performance September: Nilai AKIP Kanwil Lampung Tahun 2022 adalah 87.5. Berdasarkan Aplikasi E-Performance			
							TW4	0		0	0	Oktober: Nilai AKIP Kanwil Lampung Tahun 2022 adalah 87.5. Berdasarkan Aplikasi E-Performance November: Desember:			
		2	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 + -			94 Persen: Triwulan IV	TW1	70	Persen	70	100	Januari: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Februari: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Maret: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB		0	0
							TW2	75	Persen	75	100	April: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Mei: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Juni: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB			
							TW3	80	Persen	80	100	Juli: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Agustus: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB September: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB			
							TW4	94	Persen	94	100	Oktober: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB November: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB Desember: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB			
3.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	3	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah + -			3.1 Indeks: Triwulan IV	TW1	2.5	Nilai	3.9	156	Januari: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Februari: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Maret: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		0	0
							TW2	2.7	Nilai	3.9	144	April: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Mei: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Juni: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			
							TW3	2.9	Nilai	29	1000	Juli: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Agustus: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah September: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			
							TW4	3.1	Nilai	3.4	110	Oktober: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah November: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Desember: Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			



E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING				TARGET		REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	BOBOT
1.	Tertelaksananya rancangan produk hukum di daerah		1	1	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	80 % Triwulan IV	TW1	15	%	15	100	0	0	
				Sasaran Kinerja Pegawai:											
				1. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 3. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Jasa 3. 4. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 5. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan dan Pemukiman Kumuh 6. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang penyelenggaraan Kearsifan 7. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043 8. Mei: 1. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023-2043 2. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Kabupaten Mesuji tentang pajak daerah dan retribusi daerah 9. Juni: 1. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penataan Tjruh 10. Juli: 1. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penyelenggaraan Perindungan perempuan dan anak 3. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Pasir Baras tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah 11. Agustus: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Terlaksananya Pengharmonisan tentang Revisi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 12. September: 1. Terlaksananya Pengharmonisan tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Tanggamus 2. Terlaksananya pengharmonisan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 13. October: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pencabutan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah dan Peraturan Tjruh 2. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 4. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Tanggamus 5. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pesawaran 6. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Lampung tengah 7. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Pesawaran 8. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Mesuji 9. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak P4GN Kota Bandar Lampung 10. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Pringsewu 14. November: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Perustasaan dan Arsip 2. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tasa Cara Penyusunan Program Pembangunan Peraturan Daerah 3. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba 4. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu tentang Tata Kelola Dinas 6. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah Tulang Bawang Barat tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 7. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 8. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah 15. Desember:											
2.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		2	1	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	6 Orang Triwulan IV	TW1	0		0	100	0	0	
				Sasaran Kinerja Pegawai:											
				1. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 2. Jumlah kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan											
3.	Terselenggaranya Fasilitas perencanaan serta pemantauan dan penilaian/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		3	1	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	2 Kegiatan Triwulan IV	TW1	0		0	100	0	0	
				Sasaran Kinerja Pegawai:											
				1. Jumlah kegiatan perencanaan, pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah 2. Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian/analisis dan evaluasi produk hukum daerah											
4.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah		4	1	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	1. DIVISI PELAYANAN HUKUM LAMPUNG	82 persen Triwulan IV	TW1	10	persen	10	100	0	0	
				Sasaran Kinerja Pegawai:											
				1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Jumlah kegiatan layanan bantuan hukum litigasi											
				1. Januari: Februari: Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 2. Maret: 1. Terlaksananya pengharmonisan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Jasa 3. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 4. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan dan Pemukiman Kumuh 3. Mei: 1. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023-2043 2. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Kabupaten Mesuji tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4. Juni: 1. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penataan Tjruh 5. Juli: 1. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penyelenggaraan Perindungan perempuan dan anak 3. Terlaksananya pengharmonisan rancangan peraturan daerah Pasir Baras tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah 6. Agustus: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat 2. Terlaksananya pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Terlaksananya Pengharmonisan tentang Revisi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 7. September: 1. Terlaksananya Pengharmonisan tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Tanggamus 2. Terlaksananya pengharmonisan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 8. October: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pencabutan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah dan Peraturan Tjruh 2. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Tanggamus 5. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pesawaran 6. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Lampung tengah 7. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Pesawaran 8. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Mesuji 9. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak P4GN Kota Bandar Lampung 10. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Pringsewu 9. November: 1. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Perustasaan dan Arsip 2. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tasa Cara Penyusunan Program Pembangunan Peraturan Daerah 3. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba 4. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu tentang Tata Kelola Dinas 6. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan peraturan Daerah Tulang Bawang Barat tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 7. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 8. Terlaksananya Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah 10. Desember:											
				1. Januari: Februari: Pada bulan februari ada 6 kegiatan pemeriksaan dan upaya hukum biasa yaitu tahap penyidikan/gugatan/pemeriksaan pendahuluan, dan 1 kegiatan Tahap putusan pengadilan tingkat I pada LBH sejahtera Berama Lampung. Bulan Maret terdapat 16 kegiatan Tahap penyidikan/gugatan/pemeriksaan Pendahuluan dan 5 Kegiatan Tahap Putusan Tingkat I oleh beberapa LBH (SPS, BKHM FH UNILA, Menang Jagad, Lampung Barat) 2. April: Pada Bulan April ada 50 Kegiatan layanan bantuan hukum litigasi berupa Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan, Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I ada 27 Kegiatan yang dilaksanakan dari beberapa LBH di Prov Lampung Tahap Upaya Hukum Biasa Banding ada 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh LBH Tulang Bawang Barat 3. Mei: Pada Bulan Mei ada 24 Kegiatan layanan Bantuan Hukum berupa Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan, Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I ada 44 kegiatan dari beberapa LBH di Provinsi Lampung Layanan Bantuan Hukum Upaya Hukum Biasa Bading ada 1 Kegiatan yang dilakukan oleh LBH Nasional. 4. Juni: Pada Bulan Juni ada 33 kegiatan layanan bantuan hukum litigasi berupa Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan, Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I ada 40 Kegiatan Layanan Bankum Utikasi Upaya Hukum Biasa Bandine ada 5 Kegiatan											



E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 DIVISI IMIGRASI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI			CATATAN MONITORING	BSC	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN	BOBOT		SCORE(%)	
6.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum			3.25 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Februari: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Maret: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		0	0
							TW2	3.15	Indeks	3.25	167	April: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 2 bulan Juni Mei: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 2 bulan Juni Juni: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 2 bulan Juni			
							TW3	3.2	Indeks	5.32	166	Juli: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 3 bulan Juli Agustus: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 3 bulan Juli September: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 3 bulan Juli			
							TW4	3.25	Indeks	6.45	198	Oktober: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 3 bulan Oktober November: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada Trivulan 3 bulan Oktober Desember:			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								
7.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	7	Indeks Pengamanan Keimigrasian			3.13 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Terlaksananya 2 (Dua) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Februari: Terlaksananya 2 (Dua) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Maret: Terlaksananya 2 (Dua) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian		0	0
							TW2	3.11	Indeks	3.108	100	April: Terlaksananya 2 (Dua) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Mei: Terlaksananya 3 (Tiga) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Juni: Terlaksananya 3 (Tiga) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian			
							TW3	3.12	Indeks	3.12	100	Juli: Terlaksananya 3 (Tiga) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Agustus: Terlaksananya 5 (Lima) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian September: Terlaksananya 5 (Lima) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian			
							TW4	3.13	Indeks	5.21	166	Oktober: Terlaksananya 4 (Empat) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian November: Terlaksananya 5 (Lima) Kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian Desember:			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								
8.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian			3.25 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Februari: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Maret: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		0	0
							TW2	3.15	Indeks	3.15	100	April: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Mei: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Juni: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian			
							TW3	3.2	Indeks	5.32	166	Juli: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Agustus: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian September: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian			
							TW4	3.25	Indeks	5.37	165	Oktober: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian November: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Desember: Terlaksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								
9.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	9	Indeks Pengamanan Keimigrasian			3.13 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Februari: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Maret: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian		0	0
							TW2	3.11	Indeks	3.108	100	April: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Mei: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Juni: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian			
							TW3	3.12	Indeks	5.2	167	Juli: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Agustus: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian September: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian			
							TW4	3.13	Indeks	5.21	166	Oktober: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian November: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Desember:			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								
10.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			3.25 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Februari: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Maret: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		0	0
							TW2	3.15	Indeks	3.15	100	April: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Mei: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Juni: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian			
							TW3	3.2	Indeks	5.32	166	Juli: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Agustus: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian September: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian			
							TW4	3.25	Indeks	5.37	165	Oktober: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian November: Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian Desember:			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								
		10	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			3.13 Indeks: Trivulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.09	100	Januari: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Februari: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Maret: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian		0	0
							TW2	3.11	Indeks	3.108	100	April: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Mei: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Juni: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian			
							TW3	3.12	Indeks	3.12	100	Juli: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Agustus: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian September: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian			
							TW4	3.13	Indeks	5.21	166	Oktober: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian November: Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Desember:			
							Sasaran Kinerja Pegawai:								

Urutkan No



E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BSC			
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)				URAIAN	BOBOT	SCORE(%)	
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	80 Indeks	Triwulan IV	TW1	65	Indeks	65	100	Januari: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Januari Februari: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Februari Maret: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Maret		0	0
								TW2	70	Indeks	70	100	April: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan April Mei: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Mei Juni: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Juni			
								TW3	75	Indeks	75	100	Juli: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Juli Agustus: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Agustus September: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan September			
								TW4	80	Indeks	80	100	Oktober: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Oktober November: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan November Desember: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum memenuhi target pada Bulan Desember			
								Sasaran Kinerja Pegawai:								
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	50 %	Triwulan IV	TW1	30	%	30	100	Januari: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Januari Februari: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Februari Maret: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Maret		0	0
								TW2	35	%	35	100	April: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan April Mei: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Mei Juni: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Juni			
								TW3	40	%	40	100	Juli: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Juli Agustus: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Agustus September: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan September			
								TW4	50	%	50	100	Oktober: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Oktober November: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan November Desember: Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna memenuhi target di bulan Desember			
								Sasaran Kinerja Pegawai:								
2	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	2		1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	80 %	Triwulan IV	TW1	55	%	55	100	Januari: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Januari Februari: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Februari Maret: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Maret		0	0
								TW2	65	%	65	100	April: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan April Mei: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Mei Juni: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Juni			
								TW3	70	%	70	100	Juli: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Juli Agustus: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Agustus September: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan September			
								TW4	80	%	80	100	Oktober: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Oktober November: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan November Desember: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) memenuhi target pada bulan Desember			
								Sasaran Kinerja Pegawai:								
2	3. Persentase menurunnya residivitas	2		1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1 %	Triwulan IV	TW1	0.7	%	0.7	100	Januari: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Januari Februari: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Februari Maret: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Maret		0	0
								TW2	0.8	%	0.8	100	April: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan April Mei: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Mei Juni: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Juni			
								TW3	0.9	%	0.9	100	Juli: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Juli Agustus: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Agustus September: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan September			
								TW4	1	%	1	100	Oktober: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Oktober November: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan November Desember: Persentase menurunnya residivitas memenuhi target pada bulan Desember			
								Sasaran Kinerja Pegawai:								
2	4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	2		1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	90 %	Triwulan IV	TW1	75	%	75	100	Januari: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Januari Februari: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Februari Maret: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Maret		0	0
								TW2	80	%	80	100	April: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan April Mei: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Mei Juni: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Juni			
								TW3	85	%	85	100	Juli: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Juli Agustus: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Agustus September: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan September			
								TW4	90	%	90	100	Oktober: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Oktober November: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan November Desember: Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuhi target pada bulan Desember			
								Sasaran Kinerja Pegawai:								
3.	Rut beraturan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	3	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	1. DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG	80 Indeks	Triwulan IV	TW1	65	Indeks	65	100	Januari: Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi target pada bulan Januari Februari: Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi target pada bulan Februari		0	0



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Bandar Lampung
Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060
Laman : <http://lampung.kemenkumham.go.id>

**LAPORAN
TENTANG
EVALUASI NILAI SMART KANTOR WILAYAH DAN UPT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

1. Umum

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas suatu objek. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal, Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 telah menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud adalah Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. IKU tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan organisasi. Pada saat ini IKU tersebut kita kenal dengan nama IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA).

IKPA dan SMART merupakan dua *tools* yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan secara nasional kepada seluruh kementerian/lembaga. Dengan kombinasi nilai IKPA dan SMART sebagai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam

rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyajikan informasi tentang Laporan Evaluasi Nilai SMART selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 pada seluruh 35 (tiga puluh lima) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Tujuan

Memastikan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran telah efektif dan efisien serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga satuan kerja dapat mengoptimalkan capaian kinerja anggaran selama tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi data capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

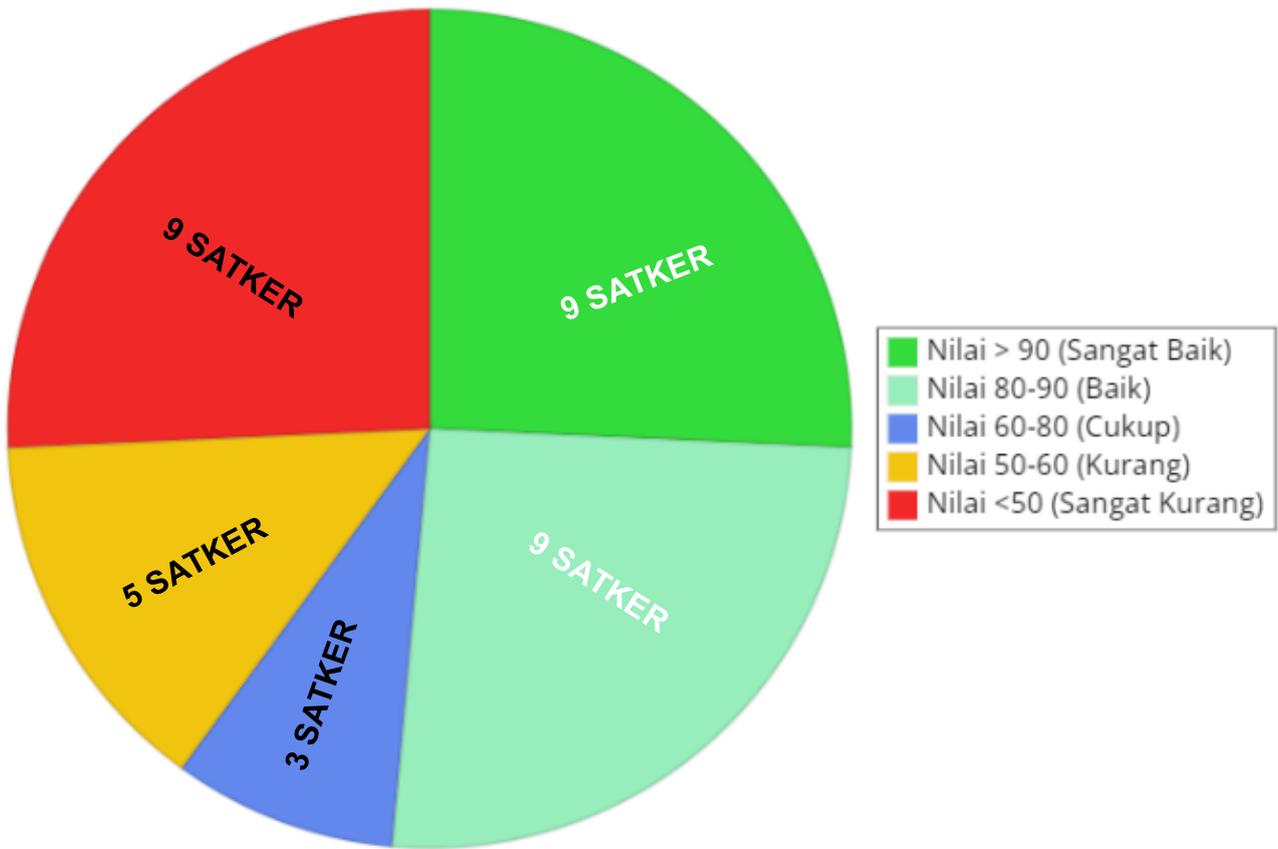
B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Sepanjang tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam hal ini subbagian program dan pelaporan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART serta pendampingan kepada satuan kerja agar memahami indikator-indikator pada SMART dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai optimal. Selanjutnya pada Triwulan IV TA 2023 ini, kegiatan monev dan pendampingan terus dilakukan setiap bulannya untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Adapun proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART Triwulan IV TA 2023 pada seluruh satuan kerja melalui tahapan menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi data capaian kinerja anggaran 35 (tiga puluh lima) satuan kerja yang diperoleh dari Aplikasi SMART.

C. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran tingkat satuan kerja meliputi 2 pengukuran yaitu Kinerja Penganggaran (Aspek Implementasi) yang diperoleh dari nilai SMART dan kinerja pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari nilai IKPA. Nilai kinerja anggaran ini ditetapkan sebesar 95% (pada akhir tahun anggaran). Para penanggung jawab/operator telah melakukan pengisian Aplikasi SMART melalui pelaporan capaian RO di Aplikasi SAKTI, sesuai dengan output yang tercapai dan menjadi tolak ukur capaian kinerja selama Triwulan IV TA 2023. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, diperoleh data bahwa masih terdapat satuan kerja yang nilai SMART dibawah 50 atau sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, sehingga mempengaruhi nilai kinerja SMART. Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan agar satuan kerja mampu meraih target yang ditentukan (nilai optimal) pada akhir Semester II. Berikut hasil capaian nilai SMART seluruh satuan kerja:

Nilai Smart Triwulan IV Tahun 2023



NO	SATUAN KERJA	NILAI SMART	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	95.27	85.43	99.59	100	15.47	88.67
2	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	95.11	79.85	99.31	98.5	16.99	92.47
3	LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG	93.34	89.71	68.88	100	20	100
4	KANWIL-SEKRETARIAT JENDERAL	93.31	85.09	98.28	98.3	14.14	85.36
5	KANWIL-DITJEN HAM	92.96	87.95	98.99	100	12.05	80.12
6	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	92.05	85.79	98.35	97.16	12.95	82.38
7	BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	91.16	91.14	99.88	100	8.86	72.16
8	BAPAS KELAS II KOTABUMI	90.84	88.63	93.78	99.06	10.88	77.2
9	KANWIL-DITJEN PEMASYARAKATAN	90.64	89.05	98.2	98.53	9.75	74.38
10	KANIM KELAS III NON TPI KALIANDA	89.84	73.28	95.84	84.34	20	100
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA B LAMPUNG	89.41	88.25	99.33	95.95	9.42	73.54
12	KANIM KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	89.19	84.06	99.51	89.27	13.69	84.23
13	KANWIL-DITJEN PP	87.29	80.76	96.72	92.95	9.96	74.91
14	KANWIL-BPHN	87.12	88.34	98.76	95.07	6.87	67.19
15	KANWIL-DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	86.99	97.88	99.87	100	2.12	55.31
16	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	86.2	87.01	96.93	93.4	7.25	68.13
17	LAPAS KHUSUS NARKOTIKA	84.73	84.23	99.89	90.61	6.52	66.31
18	KANWIL-DITJEN IMIGRASI	83.74	81.34	98.12	92.4	4.9	62.24
19	LAPAS KELAS IIA METRO	78.7	87.03	99.75	65.85	12.8	82.01
20	KANWIL-BALITBANG HAM (BSK)	71.68	87.84	97.63	81.65	-6.19	34.53
21	RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	70.67	86.47	96.02	37.25	20	0
22	BAPAS KELAS II PRINGSEWU	58.84	86.26	98.2	25.4	10.14	75.35
23	LAPAS KELAS IIB WAY KANAN	55.91	87.12	99.78	26.53	4.83	62.08
24	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	55.01	88.81	99.72	23.24	5.36	63.41
25	RUTAN KELAS IIB SUKADANA	53.7	87.77	91.03	65.79	-20	0
26	KANIM KELAS II NON TPI KOTABUMI	52.94	76.03	98.06	63.72	-20	0

27	BAPAS KELAS II METRO	41.8	66.94	92.27	36.35	-16.23	9.43
28	RUPBASAN KELAS II METRO	39.14	81.49	99.82	30.05	-20	0
29	KANWIL-DITJEN AHU	35.59	88.49	99.37	20.51	-20	0
30	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	34.49	88.74	99.38	17.93	-20	0
31	LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG	31.79	86.43	94.66	14.2	-20	0
32	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	28.62	86.91	99.93	4.6	-20	0
33	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	28.41	86.05	99.73	4.4	-20	0
34	RUTAN KELAS IIB KRUI	28.25	86	98.81	4.43	-20	0
35	RUTAN KELAS IIB MENGGALA	27.03	81.14	98.7	2.75	-20	0
	JUMLAH	68.91	85.35	97.23	64.29	0.93	49.47

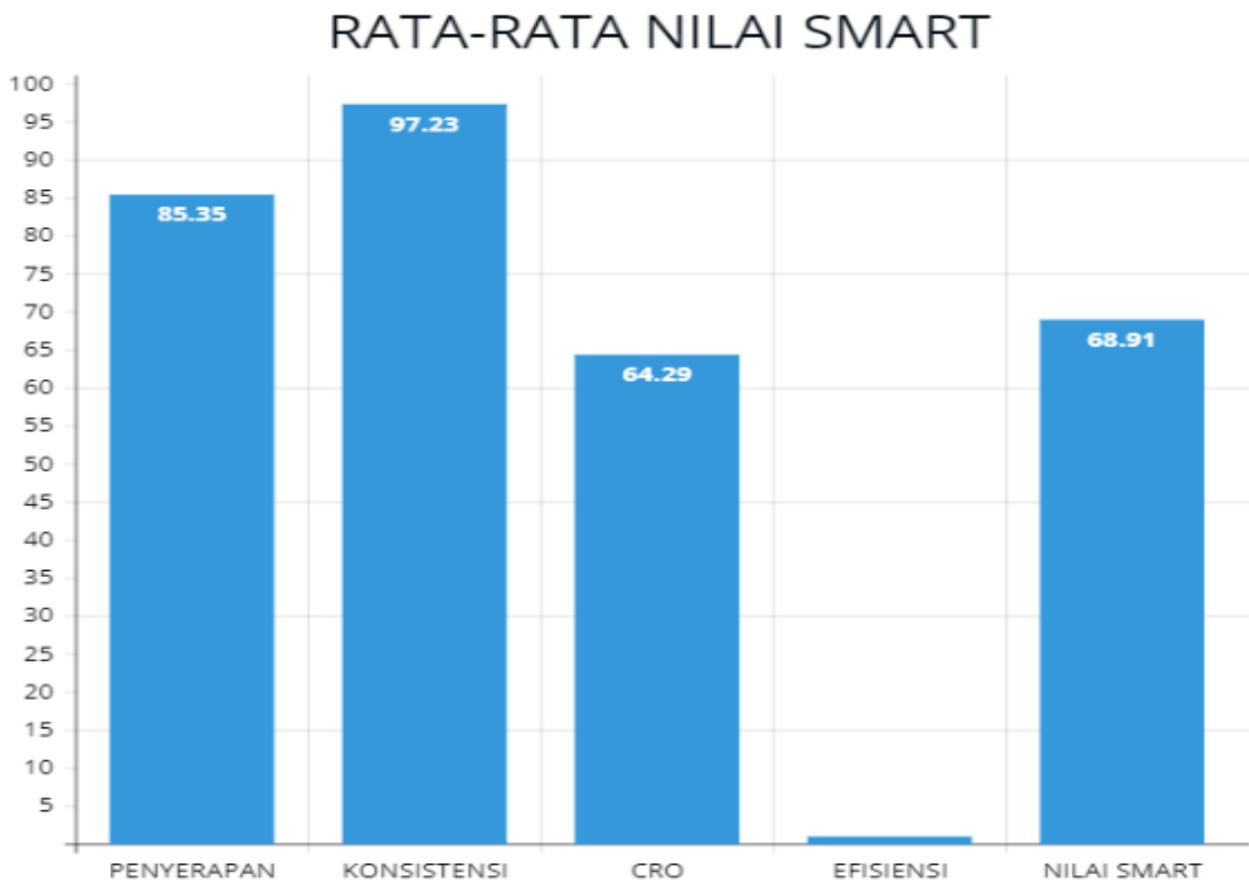
Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Tabel.1 Hasil Capaian Nilai SMART Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023

Nilai kinerja anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada *dashboard* masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. **Capaian Rincian Output (CRO) (bobot 43,5%)** dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara capaian dan target indikator, dari 35 satker sebanyak 4 satker yang memperoleh nilai CRO <10% sedangkan nilai tertinggi ada satker yaitu Rupbasan Kotabumi, LPKA Bandar Lampung, Bapas Metro, Kanwil-Ditjen KI, dan Kanwil-Ditjen HAM dengan nilai capaian RO sebesar 100%.
2. **Efisiensi (bobot 28,6%)** dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Terdapat 2 (dua) satuan kerja yang memperoleh nilai efisiensi 100%, namun sebanyak 11 (sebelas) satker memperoleh nilai efisiensi terendah yaitu 0%. Meningkatkan nilai efisiensi dapat dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK (melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa anggaran berarti harus mengondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi;
3. **Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan (bobot 18,29%)** dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Pada variabel ini hampir seluruh satuan kerja memperoleh nilai >70% hanya 1 (satu) satuan kerja yang nilai <70% yaitu LPKA Kelas II Bandar Lampung;
4. **Penyerapan anggaran (bobot 9,7%)** diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Pada Triwulan IV, realisasi anggaran terdapat 2 (dua) satker yang sudah diatas 90%, tetapi masih terdapat ada 4 (empat) satker yang masih dibawah 80%. Seluruh satker segera melakukan Monitoring dan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan anggaran agar realisasi/penyerapan anggaran dapat mencapai nilai optimal.

D. Simpulan dan Saran



Perolehan nilai rata-rata kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Triwulan IV tahun 2023 adalah **68.91%** dengan kategori **cukup**. Perolehan nilai tersebut masih belum optimal, namun nilai tersebut telah meningkat dari Nilai pada Triwulan III Yaitu **62.71%**. Monitoring dan evaluasi pengisian capaian pada aplikasi SMART pada seluruh satuan kerja harus terus dilakukan secara berkelanjutan selama tahun 2023 untuk merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan nilai SMART serta perolehan nilai optimal (minimal 95%) pada akhir tahun 2023. Adapun upaya perbaikan utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kedepannya bisa dipertimbangkan pemberian penghargaan satker berprestasi dengan capaian realisasi anggaran, SMART dan IKPA Tahun Anggaran 2023.

E. Penutup

Demikian laporan evaluasi nilai SMART Triwulan IV tahun 2023 ini dibuat sebagai data dukung pemenuhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.



Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2023

Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. Ikmal Idrus

NIP. 196903182003121002



**LAPORAN
TENTANG
E-MONEV BAPPENAS KANTOR WILAYAH DAN UPT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

1. Umum

Bahwa untuk mencapai suatu tingkatan kinerja yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia, perencanaan pembangunan mempunyai empat tahapan yaitu, penyusunan rencana, penetapan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan. Bappenas telah mengembangkan aplikasi pelaporan dan pemantauan yang diberi nama E-monev untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. E-monev Bappenas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006. Dalam aplikasi E-monev Bappenas menyampaikan tentang cara memantau kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik dan mengevaluasi kinerja kegiatan yang dilakukan agar lebih bermanfaat.

Mengharapkan agar laporan terkait dengan progres kegiatan yang dilakukan dapat langsung diunggah ke dalam aplikasi E-monev Bappenas untuk mempermudah dalam proses pemantauan. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan.

Aplikasi E-Monev Bappenas menekankan pada pelaporan data pelaksanaan Renja K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi. Penginputan Data terbagi oleh beberapa user, yaitu user K8 (Satker), user K5 (Direktorat) dan user K4 (Eselon 1). Adapun data yang diinput dilevel Komponen, RO, dan Indikator Kinerja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyajikan informasi tentang Laporan E-Monev selama Triwulan IV Tahun 2023 pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Tujuan pelaksanaan E-Monev Bappenas adalah :

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan.
- b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan.
- c. Memberikan masukan bagi penyusunan program / kegiatan tahun berikutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi data capaian kinerja anggaran pada aplikasi E-Monev Bappenas adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah dan pentingnya dalam melakukan penginputan data dengan benar dan tepat waktu. Bahwa pelaporan/penginputan pada aplikasi E-monev Bappenas sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan memastikan keberhasilan program pemerintah. Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melakukan pendampingan kepada operator Satuan Kerja dalam melakukan penginputan ke aplikasi e-Monev Bappenas dengan tepat dan akurat, sehingga pelaporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan disampaikan.

C. Hasil yang Dicapai

Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melakukan monitoring *input* data e-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) Bappenas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Dalam periode Oktober hingga November 2023, seluruh Satuan Kerja telah menginput dengan lengkap capaian realisasi anggaran ke aplikasi Bappenas. Proses input data e-Monev Bappenas merupakan langkah penting dalam memantau dan mengevaluasi capaian realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam monitoring input data e-Monev Bappenas seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, telah menginput capaian realisasi anggaran secara lengkap ke aplikasi Bappenas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam menjalankan tugas dengan integritas dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menginput capaian realisasi anggaran ke aplikasi e-Monev Bappenas menegaskan komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang baik sebagai instansi pemerintah.

18.	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Rutan Kelas IIB Menggala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Rutan Kelas IIB Krui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Rutan Kelas IIB Sukadana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
26.	Bapas Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
27.	Bapas Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
28.	Bapas Kelas II Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29.	Bapas Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
31.	Rupbasan Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
32.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
33.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
34.	Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
35.	Kanim Kelas III Non TPI Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/>

19.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Rutan Kelas IIB Menggala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Rutan Kelas IIB Krui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Rutan Kelas IIB Sukadana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
26.	Bapas Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
27.	Bapas Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
28.	Bapas Kelas II Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29.	Bapas Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
31.	Rupbasan Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
32.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
33.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
34.	Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
35.	Kanim Kelas III Non TPI Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/>

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan monitoring yang dilakukan untuk Triwulan IV (empat) Tahun 2023 telah mengumpulkan hasil Penginputan E-Monev Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Untuk penginputan pada seluruh Satuan Kerja setiap bulan telah dilaksanakan sampai dengan 100%.
2. Secara umum kendala yang dihadapi semua satuan Kerja antara lain : masih terdapatnya permasalahan dalam login E-Monev Bappenas, persentase layanan masih kecil maka tidak dapat menginput progress capaian fisik layanan, dan belum tersedia nya fitur hapus dalam penginputan detail Data Komponen, serta perubahan revisi DIPA pada aplikasi Monev BAppenas belum menyesuaikan dengan revisi terbaru.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas di satuan kerja terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Mohon dapat diterbitkan buku pedoman dalam penginputan agar satuan kerja dalam menginput agar dapat menjelaskan secara lengkap setiap tahapan dalam menggunakan aplikasi.

E. Penutup

Demikian laporan E-Monev Bappenas Triwulan IV Tahun 2023 ini dibuat sebagai data dukung pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.



Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2023

Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. Ikmal Idrus

NIP. 196903182003121002